KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Versi 2.0

Tanggal Peluncuran: 10 Juni 2025 | Tanggal Berlaku: 10 Juni 2025

www.FisheryProgress.org
contact@fisheryprogress.org

DAFTAR ISI

Pengantar	**1**
Sejarah Kebijakan HRSR	3
Revisi Kebijakan	3
Memahami Informasi Tanggung Jawab Sosial di FisheryProgress	4
Gambaran Umum	**7**
Penerapan dan Cakupan	9
Tanggung Jawab Pelaksanaan	11
Proses Tinjauan	11
Jadwal Pelaporan	12
Penyebab FIP Ditandai sebagai FIP yang Tidak Aktif	14
Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress	15
Transparansi Pelaporan	16

Bersambung ke Halaman Berikutnya →

Komponen 1: Persyaratan untuk Semua FIP		**17**
1.1	Menunjukkan bahwa Ada Pernyataan Kebijakan Publik yang Berisi Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial	18
1.2	Memberikan Informasi tentang Kapal dan/atau Nelayan yang Memanen dan Mengangkut Produk FIP	25
1.3	Melakukan Upaya Terbaik untuk Membuat Nelayan Sadar akan Hak-Hak Mereka	31
1.4	Mengkaji Ketersediaan dan Keefektifan Mekanisme-Mekanisme Pengajuan dan Penanganan Pengaduan untuk para Nelayan dalam FIP	37
1.5	Melaksanakan satu Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria FisheryProgress adanya Peningkatan Risiko Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia	43
Komponen 2: Persyaratan Tambahan untuk FIP yang Memenuhi Kriteria Risiko		**46**
2.1	Melaksanakan satu Pengkajian Risiko	47
2.2	Menyusun dan Melaksanakan satu Rencana Kerja Sosial	53
Komponen 3: Persyaratan tentang Pelaporan Sukarela		**58**
3.1	Pelaporan tentang Pengkajian Risiko dan Rencana Kerja Sukarela	59
Lampiran A: Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress		**63**
Lampiran B: Sumber Daya Penting Terkait		**66**

PENGANTAR

Diluncurkan pada 2016 oleh FishChoice, FisheryProgress adalah sebuah pusat informasi terpadu tentang kemajuan proyek-proyek peningkatan perikanan (*fishery improvement project*/FIP) di tingkat global. FishChoice mempunyai misi untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipercaya untuk para pemangku kepentingan sektor pangan laut (*seafood*) tentang bagaimana FIP melakukan upaya perbaikan. Saat ini, 96% FIP di seluruh dunia mengunakan platform ini untuk melaporkan kemajuan mereka dan ratusan perusahaan mengandalkan informasi dari FisheryProgress tentang kinerja FIP. Ini mendorong mereka untuk memberikan insentif, menanamkan investasi, dan mengakui adanya perbaikan sosial dan lingkungan. FIP-FIP di FisheryProgress beroperasi dalam konteks-konteks yang beragam dan kompleks, termasuk konteks yang diketahui memiliki risiko ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial (*Human Rights and Social Responsibility*/HRSR) memberikan kerangka kerja bagi FIP di FisheryProgress untuk memadukan tanggung jawab sosial ke dalam FIP mereka. Kebijakan HRSR didasarkan pada praktik-praktik unggulan internasional dalam tanggung jawab sosial, termasuk yang tercantum dalam Prinsip 15 dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights*/UNGPs).

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)

UNGPs adalah serangkaian pedoman untuk pemerintah dan perusahaan dalam mencegah, mengatasi, dan memberikan pemulihan dari pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di tempat bisnis beroperasi.

Prinsip-prinsip tersebut diusulkan oleh Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu John Ruggie, yang disetujui oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni 2011. Dalam resolusi yang sama, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk Kelompok Kerja PBB untuk bisnis dan HAM.

Kebijakan ini memandu FIP melalui langkah-langkah penting, misalnya membangun komitmen formal terhadap tanggung jawab sosial, memahami ruang lingkup kapal dan nelayan dalam FIP, mengidentifikasi apakah FIP beroperasi dalam konteks dengan risiko tinggi adanya kerja paksa dan perdagangan manusia, dan melakukan pengkajian yang lebih kuat untuk memahami dan mengatasi risiko-risiko potensial lainnya.

FishChoice mengakui bahwa perjalanan perbaikan masing-masing FIP ditentukan oleh risiko-risiko dan tantangan-tantangan mereka masing-masing, serta prioritas-prioritas para pemangku kepentingan. Kebijakan HRSR dan platform pelaporan FisheryProgress dirancang untuk mengkomodasi keragaman ini dalam memberdayakan FIP untuk mengembangkan pendekatan yang dirancang khusus agar selaras dengan konteks spesifik mereka sembari menjunjung tinggi transparansi dan kredibilitas. Keleluasaan ini memungkinkan platform pelaporan yang inklusif dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

Kebijakan HRSR ini dimaksudkan untuk membantu FIP dalam mengidentifikasi dan meredam risiko-risiko terkait dengan hak asasi manusia dan hak buruh di tahap pemanenan dalam rantai pasok mereka dan untuk meningkatkan transparansi upaya-upaya yang diambil FIP dan para peserta mereka untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Inti dari pelaksanaan Kebijakan ini adalah keterlibatan yang bermakna dengan para nelayan, yang tidak hanya mendukung tercapainya kemajuan dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan perburuhan namun juga mempercepat perkembangan dalam dimensi sosial mapun lingkungan.

Sejarah Kebijakan HRSR

Versi pertama Kebijakan HRSR dikeluarkan pada Mei 2021, yang kemudian diperbarui pada Maret 2022 melalui satu amandemen dan Versi 1.1 dikeluarkan pada Desember 2022. Versi 2022 ini dimaksudkan untuk memasukkan hasil pembelajaran dari pelaksanaan di satu tahun pertama dan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman. Perubahan-perubahan yang ada di dalam dokumen Kebijakan HRSR Versi 2.0 ini menanggapi umpan balik terpenting yang telah diterima FishChoice terkait Kebijakan ini selama beberapa tahun terakhir. Perubahan ini, berikut dokumen-dokumen panduan baru yang menyertainya, dimaksudkan untuk memudahkan para pelaksana FIP untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, memberikan lebih banyak keleluasaan dan arahan yang lebih baik dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang paling berat, serta meningkatkan kredibiltas pelaporan sosial FIP secara keseluruhan. Kebijakan yang sudah diperbarui ini juga lebih menekankan pada sifat keberlanjutan dari keterlibatan sosial serta upaya perbaikan sosial yang terus berlangsung.

Gambaran besar tentang perubahan-perubahan dalam Kebijakan ini bisa dilihat di Rangkuman Perubahan terhadap Kebijakan HRSR FisheryProgress .

Revisi Kebijakan

FishChoice mengakui bahwa bahwa norma-norma industri berkembang dari waktu ke waktu dan berkomitmen untuk mempertahankan persyaratan-persyaratan yang mendukung FIP dan para pemangku kepentingan mereka dengan adil dan setara dalam seluruh perjalanan peningkatan perikanan mereka.

Revisi terhadap Kebijakan HRSR ini mempertimbangkan pembelajaran dan umpan balik dari pelaksanaan Kebijakan versi yang berlaku saat ini. Secara berkala FishChoice melakukan konsultasi dengan para pelaksana FIP, para ahli dalam bidang hak asasi manusia dan hak buruh, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terhadap usulan perubahan Kebijakan. Revisi yang lebih besar dilakukan setiap tiga hingga lima tahun. Sementara itu, sesuai kebutuhan dilakukan revisi yang lebih kecil dan lebih terarah terhadap Kebijakan untuk meningkatkan kejelasan, menghilangkan ambiguitas, atau memperbaiki terjemahan.

Revisi selanjutnya terhadap Kebijakan ini akan didasarkan pada temuan-temuan dari proyek Monitoring dan Evaluasi HRSR Causal Design, yang dijadwalkan akan selesai dilaksanakan pada akhir 2025. FishChoice akan membagikan hasil temuan kepada masyarakat FIP.

FishChoice mengundang anda untuk memberikan umpan balik melalui formulir ini.

Memahami Informasi Tanggung Jawab Sosial di FisheryProgress

FisheryProgress adalah sebuah platform yang dirancang untuk memastikan data perbaikan FIP transparan dan bisa diakses, memungkinkan para pelaku dalam rantai pasok memadukan informasi ini ke dalam upaya-upaya mereka yang lebih luas dalam uji tuntas hak asasi manusia. Meskipun pemenuhan terhadap Kebijakan HRSR tidak menjamin FIP bebas dari pelanggaran hak asasi manusia atau menggantikan proses uji tuntas yang menyeluruh, data dalam platform ini memberikan wawasan yang menentukan untuk membuat keputusan.

Jenis Data yang Tersedia

- **Pengkajian Risiko Menyeluruh**: Temuan-temuan dari pengkajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko seperti kerja paksa, perdagangan manusia, kerja ijon, dan pekerja anak, termasuk pengkajian yang dilakukan menggunakan alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Assessment*/SRA)
- **Rencana Kerja Sosial dan Informasi terbaru tentang Kemajuan:** Dokumentasi tentang strategi dan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko-risiko sosial yang sudah teridentifikasi, yang didukung dengan bukti
- **Wawasan tentang Mekanisme Pengajuan dan Penanganan Pengaduan :** Laporan tentang adanya atau tidak adanya akses nelayan ke mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan penilaian tentang keefektifan mekanisme-mekanisme tersebut
- **Bukti tentang Upaya-Upaya untuk Membangun Kesadaran tentang Hak:** Dokumentasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para nelayan tentang hak-hak mereka

Keandalan dan Verifikasi

FishChoice meninjau semua data yang dikirimkan untuk memastikan data memenuhi persyaratan-persyaratan FisheryProgress namun tidak melakukan verifikasi tentang kondisi-kondisi di lapangan atau memberi jaminan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh. Sebaliknya, FisheryProgress melengkapi para pengguna dengan informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk dipadukan dengan strategi-strategi uji tuntas mereka sendiri sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks.

Pengambilan Keputusan Praktis untuk para Pengguna

FisheryProgress melayani beragam pemangku kepentingan dan setiap pemangku kepentingan bisa memanfaatkan data yang ada untuk menjawab tantangan-tantangan dan mencapai tujuan-tujuan khusus mereka sendiri:

- **Perusahaan Perikanan/Produsen:** Menggunakan platform ini untuk menyoroti kemajuan, mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan persyaratan, dan menegaskan komitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- **Pembeli di Tahap Menengah Rantai Pasok:** Menganalisis data tentang kinerja dan risiko untuk menjaga, menyesuaikan, atau menguatkan hubungan pemasok yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar-standar perusahaan.
- **Pemilik Merek dan Pengecer:** Mengakses informasi untuk menyelaraskan praktik-praktik pengadaan dengan tujuan-tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dan membuat keputusan yang berwawasan tentang keterlibatan pemasok atau tindakan perbaikan.

Mendukung Perbaikan Berkesinambungan

FishChoice mendorong pengguna untuk menggalakkan budaya akuntabilitas dengan memberikan penghargaan pada transparansi dan perbaikan berkesinambungan. Pendekatan ini khususnya sangat berdampak dalam konteks dengan risiko tinggi, di mana untuk mengatasi masalah-masalah sistemik seringkali diperlukan upaya dan kolaborasi terus menerus.

Praktik-praktik unggulan antara lain meliputi:

- **Mendukung Kemajuan:** Terus membeli dari FIP yang menunjukkan perbaikan yang besar dan menyesuaikan dengan standar-standar perusahaan, serta memberikan insentif untuk adanya transparansi dan upaya yang terus berjalan
- **Meredam Risiko:** Bermitra dengan FIP yang terbuka mengakui adanya tantangan dan mengambil langkah strategis untuk mengatasinya. Memberikan penghargaan pada upaya yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai adalah lebih efektif daripada mengharapkan kesempurnaan dengan cepat.
- **Menanamkan Investasi secara Strategis:** Mengalokasikan sumber daya untuk FIP yang aktif menangani permasalahan hak buruh dan hak asasi manusia, khususnya dalam perikanan berisiko tinggi, untuk mendorong perubahan sistemik yang berjangka panjang.

Catatan tentang Pemeringkatan Kemajuan

Peringkat FIP di profil FisheryProgress bukan merupakan hasil evaluasi adanya atau tidak adanya kemajuan dalam menangani permasalahan hak buruh dan hak asasi manusia atau upaya-upaya tanggung jawab sosial yang lebih luas. Untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang kinerja satu FIP dan keselarasannya dengan standar, pengguna harus mengevaluasi data tanggung jawab sosial serta metrik lingkungan.

GAMBARAN UMUM

Kebijakan HRSR memberikan satu kerangka kerja terstruktur untuk FIP yang melaporkan kemajuan di FisheryProgress. Kebijakan ini dibagi menjadi tiga komponen:

1. **Persyaratan untuk Semua FIP**
   Persyaratan-persyaratan dasar yang berlaku untuk semua FIP yang melapor di FisheryProgress
2. **Persyaratan Tambahan untuk FIP dengan Risiko Tinggi**
   Ada kewajiban khusus untuk FIP yang teridentifikasi beroperasi di kontek-konteks berisiko tinggi adanya kerja paksa dan perdagangan manusia
3. **Pelaporan Sukarela**
   Peluang yang bersifat opsional untuk FIP untuk melaporkan kemajuan bukan hanya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan minimum namun juga metrik perbaikan sosial tambahan

"Wajib," "harus," dan "disyaratkan/ diwajibkan"	"Semestinya," "bisa/dapat," dan "praktik unggulan"	"Terpenuhi" atau "berstatus baik"	"Sedang Mengupayakan"
Menunjukkan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk bisa tetap ada dalam daftar FisheryProgress.	Menunjukkan rekomendasi tindakan yang harus diambil.	Bahkan ketika persyaratan-persyaratan dianggap telah "terpenuhi", tetap diharapkan adanya upaya yang berkesinambungan. Persyaratan-persyaratan merupakan bagian dari satu proses perbaikan terus menerus, bukan sekedar tindakan satu kali.	Bahkan ketika persyaratan-persyaratan dianggap telah "terpenuhi", tetap diharapkan adanya upaya yang berkesinambungan. Persyaratan-persyaratan merupakan bagian dari satu proses perbaikan terus menerus, bukan sekedar tindakan satu kali.[1]

Bahkan ketika persyaratan-persyaratan dianggap telah "terpenuhi", tetap diharapkan adanya upaya yang berkesinambungan. Persyaratan-persyaratan merupakan bagian dari satu proses perbaikan terus menerus, bukan sekedar tindakan satu kali.

[1] Pilihan "sedang mengupayakan" untuk pelaporan hanya tersedia untuk Persyaratan 1.3 dan 1.4.

Komponen 1 Persyaratan untuk semua FIP	**Semua FIP yang melaporkan kemajuan di FisheryProgress harus:** **1.1** Mengeluarkan satu Pernyataan Kebijakan yang berisi komitmen publik FIP terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. **1.2** Memberikan informasi tentang kapal dan/atau nelayan yang memanen atau mengangkut produk FIP **1.3** Melakukan upaya terbaik untuk membuat nelayan sadar akan hak-hak mereka.[2] **1.4** Mengkaji ketersediaan dan keefektifan sistem-sistem yang ada untuk nelayan untuk mengangkat dan menyelesaikan permasalahan, seperti mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan.[3] **1.5** Menyelesaikan satu evaluasi mandiri untuk menentukan apakah FisheryProgress beroperasi dalalam konteks berisiko tinggi adanya kerja paksa atau perdagangan manusia.
Komponen 2 Persyaratan Tambahan untuk FIP yang Memenuhi Kriteria Risiko	**FIP yang memenuhi satu kriteria FisheryProgress atau lebih tentang adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5) harus:** **2.1** Melakukan satu pengkajian risiko menyeluruh dengan menggunakan Alat SRA atau satu metode alternatif yang memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR. **2.2** Menyusun dan melaporkan satu rencana kerja sosial yang didasarkan pada temuan-temuan dari pengkajian risiko.
Komponen 3 Persyaratan untuk Pelaporan Sukarela	**Semua FIP di FisheryProgress dapat memilih untuk memenuhi persyaratan yang melebihi yang tercantum dalam Komponen 1 dan 2.** Persyaratan **3.1** berisi rincian persyaratan-persyaratan pelaporan untuk FIP yang memilih untuk dengan sukarela memberikan laporan tentang risiko, tindakan dalam rencana kerja, dan/atau kemajuan melebihi yang dimandatkan oleh Kebijakan

[2] FIP yang telah menyelesaikan dan mengeluarkan satu SRA yang mengkaji semua Indikator Inti SRA FisheryProgress dan rencana kerja sosial terkait dapat memilih untuk melaporkan aktivitas-aktivitas Kesadaran Nelayan akan Hak sebagai aktivitas-aktivitas rencana kerja sosial. Demikian pula, FIP yang telah mengeluarkan satu SRA yang paling tidak mengkaji indikator SRA 2.1.1 Pelaporan Pengaduan dan Akses ke Pemulihan, dan menyusun satu rencana kerja dapat memilih untuk melaporkan temuan-temuan mereka tentang mekanisme-mekanisme pengajuan dan dan penanganan pengaduan melalui SRA mereka serta tindakan-tindakan yang sedang diambil untuk mengatasi segala kesenjangan yang teridentifikasi melalui tindakan-tindakan rencana kerja sosial mereka.
[3] Ibid.

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan HRSR sebagai syarat menggunakan FisheryProgress.

Kebijakan HRSR dirancang untuk sejalan dengan ruang lingkup atau unit FIP (yaitu Unit dari FIP), yang fokus untuk melakukan intervensi-intervensi dan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan satu perikanan. Meskipun FIP bisa berdampak pada perikanan secara keseluruhan, Kebijakan HRSR fokus di tingkat **nelayan/kapal** (yaitu entitas yang memanen dan mengangkut[4] **produk FIP**). Apakah semua produk yang dipanen dari perikanan dianggap sebagai produk FIP akan tergantung pada **peserta FIP** dan akan berbeda-beda antar FIP.

Penerapan masing-masing persyaratan diuraikan dalam bagian Rincian Persyaratan untuk setiap persyaratan, seperti di bawah ini. Tanggung jawab yang harus ditanggung dan intervensi yang harus dilakukan bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia dan hak buruh yang ada selama tahap pemanenan dalam rantai pasok FIP, termasuk semua aktivitas penangkapan ikan dalam rantai pasok FIP, baik yang dilakukan dari pantai, dari atas kapal, atau di tempat lain serta aktivitas pemindahan muatan antar kapal.

Kebijakan HRSR ini menggunakan bahasa yang netral gender dan dimaksudkan untuk mencakup semua orang tanpa memandang gender.

[4] Kebijakan ini berlaku untuk semua kapal yang mengangkut produk-produk FIP, misalnya kapal alih muatan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk pengangkutan seafood di daratan.

Definisi

Produk FIP: Produk seafood yang dipanen dari satu perikanan sasaran FIP dan dijual baik secara langsung atau tidak langsung kepada para peserta rantai pasok. Produk FIP meliputi semua produk seafood yang ditangkap dan dijual di dalam Unit FIP — yaitu produk-produk yang didaratkan dari kapal/nelayan yang tercatat di atas kapal/daftar nelayan dan dijual kepada para pelaku rantai pasok yang diidentifikasi sebagai koordinator FIP dan/atau peserta FIP.

Peserta FIP: Segala entitas yang berpartisipasi aktif dalam satu FIP dengan memberikan bantuan keuangan atau non-keuangan kepada proyek dan/atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam rencana kerja. FIP diwajibkan untuk berpartisipasi aktif oleh perusahaan yang ada dalam rantai pasok. Peserta penting lainnya adalah pemerintah, manajer perikanan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Nelayan: Siapa pun dengan umur atau gender apa pun yang dipekerjakan atau terlibat dalam penangkapan atau pengumpulan seafood, baik dari pantai atau dari kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan. Nelayan juga termasuk orang-orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam kapasitas apa pun atau melakukan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, termasuk mereka yang bekerja di atas kapal yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan namun tidak termasuk kapten kapal, personil angkatan laut, siapa pun yang merupakan aparatur sipil negara, orang-orang yang berbasis di tepi pantai yang melakukan pekerjaan di atas kapal penangkapan ikan, dan para pengamat perikanan.

Unit FIP: Cakupan dan batasan khusus satu FIP, termasuk stok sasaran, jenis alat penangkapan ikan, kapal yang berpartisipasi, dan para pelaku rantai pasok yang teridentifikasi sebagai koordinator dan peserta FIP.

Kapal: Satu kendaraan laut, termasuk kapal alih muatan, yang digunakan untuk menangkap atau mengangkut ikan atau nelayan. Semua kapal yang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan tangkapan dalam satu FIP masuk dalam cakupan Kebijakan HRSR ini tanpa memandang apakah mereka merupakan peserta resmi dalam FIP atau tidak.

Tanggung Jawab Pelaksanaan

FIP dibentuk dengan pemahaman bahwa berbagai pemangku kepentingan harus saling mendukung untuk meningkatkan kinerja dan untuk memantau dan mendorong perubahan perilaku dalam rantai pasok. Ini artinya semua peserta FIP bisa memainkan peran dalam memastikan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Namun demikian, seperti halnya peran dan tanggung jawab untuk memastikan peningkatan keberlanjutan lingkungan bisa berbeda-beda antar FIP, demikian pula peran dan tanggung jawab untuk peningkatan sosial. FishChoice mendorong para peserta FIP untuk secara proaktif mengangkat pembahasan untuk melakukan tinjauan terhadap rincian persyaratan dalam Kebijakan HRSR ini dan untuk menetapkan peran dan tanggung jawab pelaksanaan dengan jelas.

Tanpa melihat siapa yang pada akhirnya melaksanakan pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut, para pihak yang **biasanya bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan lingkungan di FisheryProgress juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan tentang pelaksanaan Kebijakan HRSR ini**. FishChoice mendorong FIP mempertimbangkan bermitra dengan atau memperkerjakan tenaga ahli bidang sosial untuk membantu dalam pelaporan kemajuan sosial dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR.

Proses Tinjauan

FIP menyediakan data yang diperbarui setiap enam bulan. FishChoice melakukan tinjauan terhadap informasi yang dikirimkan oleh FIP untuk menentukan apakah informasi yang dikirimkan secara efektif memenuhi persyaratan situs sebelum dimuat. Persyaratan-persyaratan tersebut ada dalam Pedoman Tinjauan FIP FisheryProgress. Komite Teknis situs melakukan pemeriksaan langsung dan acak untuk memastikan tinjauan dilakukan secara konsisten dan sesuai standar.

Segala permasalahan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dibuat FishChoice atau masalah-masalah prosedural yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan HRSR ini ditangani melalui proses penyelesaian sengketa dan banding FisheryProgress. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses tersebut dan kriteria banding yang diterima silahkan mengunjungi situs web FisheryProgress.

Jadwal Pelaporan

Pelaporan rutin memberi peluang kepada FIP untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan yang mereka capai, serta untuk berbagi pembelajaran dan tantangan, dan untuk melibatkan para pemangku kepentingan ini untuk memberikan dukungan dalam upaya perbaikan lebih lanjut. Pelaporan rutin juga memastikan para pengguna FisheryProgress mempunyai akses ke informasi yang tepat waktu dan transparan untuk menentukan apakah sebuah FIP memenuhi komitmen-komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial.

Tabel 1 merinci baik jadwal pelaporan awal dan pelaporan kemajuan untuk setiap persyaratan. P**erlu dicatat bahwa batas waktu khusus untuk FIP untuk memenuhi persyaratan-persyaratan pelaporan bisa berbeda-beda sesuai dengan siklus pelaporan mereka masing-masing, yang didasarkan pada kapan FIP pertama kali masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.** Penyerahan dokumen dan proses tinjauan dilakukan sebagai bagian dari pelaporan rutin enam bulanan dan tahunan FIP.

Tabel 1: Jadwal Pelaporan Awal dan Kemajuan

Persyaratan Kebijakan		Pelaporan Awal	Pelaporan Kemajuan
1.1	**Pernyataan Kebijakan**	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
1.2	**Informasi tentang kapal dan/atau nelayan**	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
1.3	**Kesadaran nelayan akan hak**	Laporan tahunan pertama[5]	Setiap laporan tahunan, atau setiap enam bulan jika sedang mengupayakan pemenuhan persyaratan
1.4	**Mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan**	Laporan tahunan pertama[6]	Setiap laporan tahunan, atau setiap enam bulan jika sedang mengupayakan pemenuhan persyaratan
1.5	**Evaluasi mandiri terhadap kriteria risiko**	Untuk masuk daftar sebagai FIP aktif	Setiap laporan tahunan
2.1	**Pengkajian risiko (jika disyaratkan)[7]**	Laporan tahunan pertama, jika satu kriteria risiko atau lebih terpenuhi (lihat Persyaratan 1.5)[8]	Setiap tiga tahun, atau lebih sering jika diinginkan
2.2	**Rencana kerja sosial (jika disyaratkan)[9]**	Laporan tahunan pertama atau enam bulan setelah hasil [10]	Setiap enam bulan
3.1	**Pelaporan tentang pengkajian risiko dan rencana kerja sukarela**	Kapan pun	Lihat bagian persyaratan untuk rincian lebih lanjut

[5] 'FIP yang melakukan satu pengkajian risiko menggunakan Alat SRA bisa memberikan laporan berdasarkan persyaratan ini dalam Komponen 2. Silahkan mengacu ke Pedoman Tinjauan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
[6] FIP yang melakukan pengkajian risiko menggunakan Alat SRA bisa memberikan laporan berdasarkan persyaratan ini dalam Komponen 2.
[7] FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5) harus memenuhi Persyaratan 2.1.
[8] Jika pada satu waktu jawaban satu FIP terhadap evaluasi mandiri mengalami perubahan dan FIP memenuhi kriteria risiko, harus dilakukan satu pengkajian risiko (Persyaratan 2.1) 12 bulan kemudian.
[9] FIP harus menyusun satu rencana kerja untuk mengatasi semua indikator yang mempunyai skor untuk risiko tinggi dalam satu SRA. FIP yang menyerahkan hasil pengkajian alternatif juga harus menyerahkan satu rencana kerja terkait atau rencana aksi perbaikan.
[10] Setelah FIP melaporkan pemenuhan terhadap satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP tersebut mempunyai waktu hingga 18 bulan untuk menyelesaikan rencana kerja sosial. Perlu dicatat bahwa ini adalah enam bulan *setelah* pengkajian risiko selesai dilaksanakan (Persyaratan 2.1). FIP diperbolehkan dan didorong untuk menyerahkan rencana kerja sosial mereka bersamaan dengan pengkajian risiko mereka.

Fokus dan isi pelaporan berbeda-beda antara Pelaporan Awal dan Pelaporan Kemajuan, sebagai berikut:

- **Pelaporan awal:** FIP menyerahkan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana mereka telah memenuhi persyaratan (atau untuk Persyaratan 1.3 dan 1.4, menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi persyaratan).
- **Pelaporan kemajuan:** FIP menyerahkan dokumentasi yang melaporkan segala langkah yang telah diambil, perubahan atau kemajuan yang terlah dicapai sejak siklus pelaporan sebelumnya.

Penyebab FIP Ditandai sebagai FIP yang Tidak Aktif

FIP harus memenuhi jadwal pelaporan awal tentang pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam Kebijakan HRSR untuk mempertahankan status sebagai FIP aktif di FisheryProgress. FIP juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kebijakan HRSR dalam pelaporan kemajuan rutin mereka setiap enam bulan dan satu tahun sekali. Jika FIP tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Kebijakan, FishChoice akan menganggap laporan tidak lengkap dan akan menandai laporan FIP sebagai laporan yang terlewat belum diserahkan. Laporan yang terlewat tidak diserahkan dua kali berturut-turut (termasuk laporan yang terlewatkan oleh satu FIP dan dikirimkan setelahnya) akan membuat FIP dianggap sebagai tidak aktif. Rincian tambahan tentang laporan yang selesai dan laporan yang terlewat, FIP yang menjadi tidak aktif, dan bagaimana mengaktifkan kembali FIP yang tidak aktif ada dalam Pedoman Tinjauan FIP.

Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress

FishChoice mempunyai komitmen untuk memastikan keakuratan dan transparansi data dan informasi yang mereka terbitkan. para pemangku kepentingan yang ingin mendapat kejelasan tentang keakuratan atau integritas informasi FIP disarankan untuk menggunakan Proses Penyelesaian Sengketa dan Banding FisheryProgress yang ada di dalam dokumen **Proses-Proses untuk Mengatasi Permasalahan tentang Informasi FIP di FisheryProgress**.

Proses ini berisi kerangka kerja untuk:

- Melakukan tinjauan terhadap laporan insiden kerja paksa, perdagangan manusia, atau pekerja anak
- Menyelesaikan sengketa dan mengelola banding terkait dengan data FIP yang dipublikasikan

Proses ini memastikan para pemangku kepentingan mendapat kesempatan untuk mempertanyakan ketidakakuratan. Jika permasalahan yang diangkat memang terbukti benar, FIP akan disyaratkan untuk memastikan profil mereka diperbarui untuk memperbaiki ketidakakuratan. Dengan menggunakan sistem ini, para pemangku kepentingan membantu ditegakannya akuntabilitas, mendukung perbaikan berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap peningkatan hasil sosial dan lingkungan.

Penting untuk diperhatikan bahwa proses ini semata-mata fokus untuk memastikan FIP memenuhi persyaratan-persyaratan pelaporan FisheryProgress dan bahwa informasi yang dipublikasikan merupakan informasi yang akurat. Proses ini tidak menggantikan mekanisme-mekanisme yang mengikat secara hukum untuk upaya-upaya mitigasi dan remediasi di lapangan.

Transparansi Pelaporan

Semua dokumentasi yang disediakan FIP untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR ini dipublikasikan di profil FIP di FisheryProgress. Transparansi ini memastikan bahwa para pengguna FisheryProgress mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan uji tuntas mereka sendiri. Transparansi juga berfungsi sebagai satu lapisan pengawasan tambahan untuk memperkuat keakuratan dan kredibilitas informasi FIP.

Informasi yang diserahkan sebagai bagian dari laporan FIP tidak boleh bersifat rahasia. Merupakan tanggung jawab FIP untuk memastikan mereka melakukan langkah-langkah yang semestinya untuk memastikan hal tersebut. FishChoice sangat mendorong para koordinator FIP untuk mendapatkan persetujuan untuk mempublikasikan informasi sebelum menyerahkannya kepada FisheryProgress. FIP yang mempunyai kekhawatiran dari segi hukum atau keamanan dalam berbagi informasi di domain publik bisa meminta agar informasi pelaporan yang wajib tetap tidak dipublkasikan meskipun FishChoice akan tetap menyimpan dokumentasi secara internal untuk keperluan tinjauan. FIP harus melengkapi permintaan seperti itu dengan justifikasi dan FishChoice akan meninjau dan menyetujuinya kasus per kasus.

KOMPONEN 1:
PERSYARATAN UNTUK SEMUA FIP

KOMPONEN 1: PERSYARATAN UNTUK SEMUA FIP

1.1 Menunjukkan bahwa Ada Pernyataan Kebijakan Publik yang Berisi Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial

1.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FishChoice mengharapkan semua FIP yang memberikan laporan di FisheryProgress menjaga komitmen untuk mengurangi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh di FIP. FIP menunjukkan komitmen tersebut dengan memberikan satu pernyataan kebijakan publik ("Pernyataan Kebijakan") yang menyatakan tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi mereka tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, FIP harus melengkapi dan menyerahkan semua informasi yang diperlukan dalam bagian Pernyataan Kebijakan di profil FisheryProgress, termasuk satu atau lebih dari satu Pernyataan Kebijakan serta informasi terkait (misalnya persetujuan, tanggal berlaku, prosedur dan praktik pelaksanaan, dsb.). FIP bertanggung jawab untuk memastikan setiap Pernyataan Kebijakan memenuhi kriteria wajib berikut ini.

Koordinator FIP

Perorangan atau organisasi yang ditetapkan sebagai nara hubung utama FIP untuk FisheryProgress. Pengguna bisa menghubungi koordinator FIP dengan pertanyaan-pertanyaan tentang FIP atau mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana melibatkan dan/atau membeli dari FIP.

Rantai pasok dan peserta FIP

Rantai pasok dan peserta FIP: Peserta FIP yang membeli atau menjual produk FIP. Ini termasuk baik perusahaan maupun para wakil mereka.

Pernyataan Kebijakan

Sebuah kesepakatan tertulis yang digunakan FIP dan/atau para pesertanya untuk secara publik menyatakan tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi paling tidak tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pernyataan Kebijakan dapat berupa kode perilaku, komitmen, kebijakan, standar pedoman, atau dokumen lain.

Pernyataan Kebijakan harus memenuhi kriteria berikut:

- Berlaku untuk semua kapal dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan, baik di daratan atau di atas kapal, serta mereka yang terlibat dalam pengangkutan/ pemindahan muatan antar kapal produk FIP di lautan.
- Mencakup kategori-kategori berikut yang berkaitan dengan Indikator-Indikator Alat SRA[11] — seperti yang berlaku untuk kapal dan nelayan dalam FIP[12]:
    - Kekerasan dan pelecehan (SRA1.1.1)
    - Kerja paksa (SRA1.1.2)
    - Perdagangan manusia dan perekrutan yang adil (SRA1.1.3)
    - Kerja ijon di perikanan skala kecil atau budidaya perikanan (SRA1.1.4)
    - Pekerja anak (SRA1.1.5)
    - Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama (SRA1.1.6)
    - Penghasilan dan tunjangan (SRA1.1.7)
    - Istirahat yang cukup (SRA1.1.8)
    - Akses ke layanan dasar untuk tempat tinggal pekerja/tempat tinggal di atas kapal (SRA1.1.9a)
    - Akses ke layanan dasar untuk komunitas penangkapan ikan skala kecil atau perikanan rakyat (SRA1.1.9b)
    - Keselamatan kerja (SRA1.1.10)
    - Respons medis (SRA1.1.11)
    - Hak pengamat (SRA1.1.12)
    - Hak adat (SRA1.2.1)
    - Pelaporan pengaduan dan akses ke pemulihan (SRA2.1.1)
    - Diskriminasi (SRA2.2.2)

[11] Nomor indikator SRA merujuk pada SRA versi 2 yang diterbitkan pada 2025.
[12] Kategori-kategori ini (yang merujuk pada indikator-indikator SRA) dirancang untuk mencakup beragam perikanan dan konteks. Ini artinya tidak semua kategori berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang bagaimana menentukan kategori yang berlaku, silahkan mengacu pada tabel Panduan Penentuan Skor di Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Seafood.

- Disetujui oleh pihak atau pihak-pihak terkait dalam FIP. Paling tidak, ini artinya salah satu atau lebih[13] dari berikut ini:
  - Koordinator FIP[14] menandatangani satu Pernyataan Kebijakan atas nama peserta rantai pasok FIP.
  - Setiap peserta rantai pasok FIP menandatangani satu Pernyataan Kebijakan.
  - Setiap peserta rantai pasok FIP mempunyai satu Pernyataan Kebijakan yang dipublikasikan di situs web perusahaan.
- Selalu aktif selama FIP terdaftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.
- Disampaikan kepada semua peserta FIP dalam bahasa yang mereka pahami.

Setiap FIP harus mengkompilasi dan membuat rangkuman informasi kunci tentang Pernyataan Kebijakan mereka dalam bagian Pernyataan Kebijakan di profil FisheryProgress mereka. Secara khusus, informasi tersebut harus berisi hal berikut tentang Pernyataan Kebijakan FIP:

- Uraian singkat Pernyataan Kebijakan dan untuk siapa pernyataan tersebut berlaku, termasuk penerapan masing-masing Pernyataan Kebijakan dan pihak atau para pihak dalam FIP yang menyetujui setiap Pernyataan Kebijakan
- Uraian tentang kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, praktik-praktik, dan sistem-sistem yang ada untuk memastikan tanggung jawab, komitmen, dan/atau ekspektasi yang tercantum dalam Pernyataan dilaksanakan dan dijunjung tinggi.
- Satu afirmasi dari FIP bahwa mereka telah memverifikasi bahwa Pernyataan Kebijakan memenuhi semua kriteria yang disyaratkan

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP yang aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

[13] Satu FIP bisa memilih untuk melaksanakan kombinasi dua pilihan ini.
[14] Jika satu FIP mempunyai lebih dari satu koordinator FIP, hanya satu koordinator FIP yang harus menandatangani.

Pelaporan Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini agar masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

Pelaporan Kemajuan

FIP harus memberikan konfirmasi dalam laporan tahunan mareka bahwa informasi yang mereka berikan tetap berlaku dan memenuhi rincian persyaratan di atas. Segala perubahan terhadap FIP, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan koordinator FIP dan/atau para peserta rantai pasok dapat mengakibatkan perlunya FIP untuk menyerahkan satu Pernyataan Kebijakan yang sudah diperbarui dan informasi terkait.

1.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Mempublikasikan Pernyataan Kebijakan merupakan satu cara yang efektif bagi FIP untuk menyampaikan kepada para nelayan dan para pemangku kepentingan lain tentang komitmen mereka untuk mengedepankan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Ini juga merupakan satu langkah mendasar bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan proses uji tuntas hak asasi manusia, yang menunjukkan adanya komitmen resmi untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

FIP ada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Persyaratan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman tersebut dengan memungkinkan para koordinator dan peserta FIP untuk menentukan model terbaik untuk menggambarkan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Sebagian FIP dapat memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan membuat satu Pernyataan Kebijakan tunggal, misalnya yang diuraikan dalam boks Praktik Unggulan. FIP-FIP lain bisa memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan, misalnya, menginformasikan kode perilaku yang telah diadopsi oleh para peserta rantai pasok mereka. Memungkinkan FIP untuk merancang Pernyataan Kebijakan mereka sendiri meningkatkan rasa memiliki dan akuntablitas dan menciptakan keleluasaan dalam memastikan pendekatan mereka mencerminkan konteks mereka masing-masing. Tanpa memandang siapa yang menyetujui Pernyataan Kebijakan, semua peserta FIP mempunyai tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan hak asasi manusia dijunjung tinggi.

Melakukan Konsultasi dengan para Pemangku Kepentingan tentang Pernyataan Kebijakan

FIP sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, khususnya dan yang paling penting dengan para nelayan dan para wakil mereka, ketika menyusun Pernyataan Kebijakan mereka. Setelah menyelesaikan Pernyataan Kebijakan mereka, penting bagi FIP untuk secara efekif menyampaikan ekspektasi dan komitmen mereka kepada semua pihak terkait. Sebagai contoh, FIP dapat dan semestinya memasukkan Pernyataan Kebijakan dalam kontrak kemitraan, pembiayaan, dan pembelian antar para peserta FIP dan mitra rantai pasok mereka, termasuk segala Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh para peserta FIP

Menyusun satu Pernyataan Kebijakan

Model FIP mengacu pada gagasan bahwa berbagai pemangku kepentingan harus saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kinerja dan untuk memantau serta mendorong perubahan perilaku dalam rantai pasok. Untuk menunjukkan bahwa kemauan untuk melakukan tindakan bersama dan mengemban tanggung jawab bersama yang dimiliki FIP tidak hanya berlaku untuk keberlanjutan lingkungan namun juga tanggung jawab sosial, **FishChoice sangat mendorong semua peserta FIP untuk berkomitmen pada satu Pernyataan Kebijakan kolektif tunggal.**

Langkah-langkah yang diambil untuk memegang teguh Pernyataan Kebijakan bisa berbeda-beda antar berbagai jenis peserta dan pemangku kepentingan FIP. Sebagai contoh:

- Peserta pengecer/pemilik merek bisa membuat, mengkomunikasikan, dan memenuhi ekspektasi-ekspektasi dan memberikan bantuan finansial dan/atau teknis kepada kapal dan nelayan.
- Para peserta dari pengolahan bisa menegakkan komitmen dan ekspektasi melalui keputusan-keputusan mereka dalam melakukan pembelian
- Peserta dari para produsen bisa meningkatkan pengelolaan, kebijakan, dan prosedur perusahaan mereka dan melibatkan wakil dari para pekerja
- Peserta dari organisasi dagang dan industri bisa menetapkan tujuan besar dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.
- Para peserta dari LSM konservasi bisa mengoptimalkan wawasan mereka untuk memberi penekanan pada potensi-potensi risiko dan memastikan mereka menggunakan pendekatan yang tidak menimbulkan kerugian (“*do no harm*”) dalam kerja mereka.
- Peserta dari LSM yang bergerak dalam hak-hak sosial-ekonomi, hak buruh, dan hak asasi manusia bisa memberikan keahlian mereka dalam mengkaji risiko dan merancang perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan konteks setempat.
- Peserta dari akademisi bisa bekerja untuk memahami risiko dan mengidentifikasi praktik-praktik unggulan untuk meredam risiko.
- Semua peserta FIP bisa melobi Organisasi-Organisasi Pengelolaan Perikanan Kawasan (*Regional Fisheries Management Organizations*/RFMOs), serta pemerintah-pemerintah terkait dan negara-negara asal kapal untuk bisa meningkatkan kerangka kerja hukum, peraturan dan pelaksanaan agar memenuhi standar-standar internasional.
- Peserta dari pemerintah bisa mengidentifikasi kesenjangan hukum, peraturan, dan pelaksanaan dan berupaya untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut.

FIP yang berkeinginan untuk mengadopsi pendekatan ini didorong untuk menggunakan Model Pernyataan Kebijaka[15] Fishery Progress untuk memenuhi Persyaratan 1.1.

[15] Model Pernyataan Kebijakan bisa dilihat di bagian templat di dashboard pengguna.

1.2 Memberikan Informasi tentang Kapal dan/atau Nelayan yang Memanen dan Mengangkut Produk FIP

1.2.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP harus memberikan informasi tentang kapal dan/atau nelayan yang memanen atau mengangkut produk FIP dengan mengisi semua bidang isian dalam bagian Daftar Kapal di profil mereka di FisheryProgress.

Informasi yang harus disediakan oleh FIP untuk memenuhi persyaratan ini dibedakan berdasarkan jenis aktivitas penangkapan ikan dalam FIP seperti yang dirinci di bawah ini. FIP yang memiliki jenis campuran harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait untuk setiap jenis, seperti di bawah ini.

FIP dengan Kapal

FIP yang memanen atau mengangkut produk FIP menggunakan kapal harus memberikan informasi tentang semua kapal yang terlibat dalam penangkapan dan pengangkutan produk FIP, bahkan jika pemilik kapal bukan merupakan peserta formal dalam FIP.

Kapal Besar dan Kapal segala Ukuran yang Melakukan Penangkapan Ikan di Luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Mereka

FIP dengan **kapal besar** dan/atau kapal segala ukuran yang melakukan penangkapan ikan di luar ZEE negara mereka harus mengkompilasi satu daftar kapal-kapal seperti itu yang mencakup informasi berikut

- Untuk masing-masing kapal:
  - Nama kapal
  - Kategori ukuran kapal
  - Panjang kapal (opsional)
  - Jenis kapal/alat tangkap
  - Nama **pemilik**

  - Nama **operato**r (jika berbeda dari pemilik)
  - Bendera
  - ***Unique Vessel Identifier*** **(UVI)**, atau dalam Bahasa Indonesia berarti Tanda Pengenal Unik Kapal, jika sesuai. Jika tidak, nomor pengenal alternatif seperti Nomor Registrasi Nasional, atau *Maritime Mobile Service Identity* (MMSI) yang dalam Bahasa Indonesia berarti Identitas Layanan Mobil Maritim
- Informasi tentang bagaimana FIP mengumpulkan informasi tentang kapal (yaitu sumber informasi)
- Tanggal FIP mengompilasi informasi
- Konfirmasi dari koordinator FIP bahwa mereka telah berupaya sedapat mungkin untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap dan akurat

Dalam hal nomor identifikasi kapal, FIP harus memberikan UVI untuk semua kapal yang mempunyai UVI. FIP juga bisa memberikan nomor identifikasi tambahan untuk kapal-kapal tersebut dan disarankan untuk menggunakan MMSI juga jika ada. Untuk kapal yang tidak memiliki UVI, FIP harus memberikan satu nomor identifikasi alternatif atau lebih beserta informasi tentang jenis pengenal tersebut. FishChoice juga sangat menyarankan agar jika memungkinkan, FIP membagikan informasi untuk membantu FishChoice agar bisa memahami dengan lebih baik kendala-kendala dan alasan-alasan yang saat ini mencegah atau menghambat kapal-kapal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan UVI untuk mendapatkannya.

Definisi[16]

Kapal besar: Kapal dengan ukuran 10 GT atau lebih atau memiliki panjang 12 m atau lebih.

Kapal kecil: Kapal dengan ukuran kurang dari 10 GT dan panjang kurang dari 12 m.

Unique Vessel Identifier **(UVI) atau Tanda Pengenal Unik Kapal :** Satu nomor unik global yang diberikan kepada satu kapal untuk menjamin keterlacakan melalui identifikasi kapal yang bisa dipercaya, terverifikasi dan permanen

FisheryProgress menerima UVI berikut: nomor Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organisation* /IMO), Tanda Pengenal Unik Kapal Tuna (*Tuna Unique Vessel Identifier*/TUVI), dan UVI Yayasan Keberlanjutan Seafood Internasional (*International Seafood Sustainability Foundation UVI*/ISSF-UVI).

Operator kapal: Perorangan atau entitas legal yang mengemban tanggung jawab dari pemilik untuk mengoperasikan kapal dan, karena mengemban tanggung jawab tersebut, telah setuju untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab pemilik. Operator kapal bisa saja adalah pemilik kapal, kapten/nakhoda kapal, juru mudi, manajer, agen, atau kapal tanpa nakhoda dan anak buah kapal.

Pemilik kapal: Kapal bisa saja dimiliki oleh satu atau lebih dari satu entitas, termasuk pemilik sah dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki atau mengendalikan pemilik sah.

[16] Istilah tambahan terkait dan definisi tambahan untuk melengkapi daftar kapal bisa dilihat di Daftar Istilah FisheryProgress.

Kapal Kecil

FIP dengan **kapal kecil** harus menyediakan:

1. Informasi tentang semua kapal di dalam FIP dalam satu dari dua bentuk berikut:
    a. Satu deskripsi tentang armada yang meliputi:
        i. Jumlah kapal
        ii. Tempat pendaratan tangkapan
        iii. Komunitas asal nelayan
        iv. Jenis alat tangkap

    ATAU

    b. Satu daftar kapal yang meliputi:
        i. Nama kapal
        ii. Kategori ukuran kapal
        iii. Panjang kapal (opsional)
        iv. Jenis kapal/alat tangkap
        v. Nama pemilik
        vi. Nama operator (jika beda dari pemilik)
        vii. Bendera (jika berlaku)
        viii. Tempat pendaratan
        ix. Nomor Registrasi Nasional dan nomor identifikasi tambahan (opsioonal) seperti MMSI
2. Informasi tentang bagaimana FIP mengumpulkan informasi (yaitu sumber informasi)
3. Tanggal FIP menyusun informasi
4. Konfirmasi koordinator FIP bahwa mereka telah berupaya sedapat mungkin untuk memastikan informasi yang tersedia lengkap dan akurat

Daftar kapal untuk kapal kecil

Meskipun FIP dengan kapal kecil tidak diwajibkan untuk menyerahkan daftar kapal, FishChoice sangat menyarankan agar mereka menyediakannya.

FIP tanpa Kapal

FIP yang memanen produk-produk FIP tanpa kapal, misalnya penangkapan ikan berbasis daratan atau pemanenan pasang surut, harus memberikan informasi tentang nelayan.

FIP yang memanen produk FIP tanpa kapal harus memberikan:

1. Satu deskripsi tentang nelayan yang meliputi:
    a. Perkiraan jumlah nelayan
    b. Tempat pendaratan untuk tangkapan
    c. Komunitas asal nelayan
    d. Jenis praktik penangkapan ikan
2. Informasi tentang bagaimana FIP mengumpulkan informasi tentang nelayan (yaitu sumber informasi)
3. Tanggal FIP mengumpulkan informasi
4. Konfirmasi koordinator FIP bahwa mereka telah berupaya sedapat mungkin untuk memastikan informasi yang tersedia lengkap dan akurat

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini. FIP yang mempunyai kombinasi jenis-jenis aktivitas penangkapan ikan harus melaporkan semua jenis yang ada di dalam FIP.

Pelaporan Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

Pelaporan Kemajuan

FIP harus melakukan pembaruan terhadap informasi mereka tentang kapal dan/atau nelayan paling tidak satu tahun sekali sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.

1.2.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Memahami kapal dan nelayan yang mana yang terlibat dalam pemanenan dan pemindahan muatan produk-produk FIP merupakan langkah paling mendasar dalam memperkuat uji tuntas hak asasi manusia, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas bersama dalam seluruh rantai pasok untuk memaksimalkan upaya perbaikan. para pemangku kepentingan ini memainkan peran menentukan dalam mewujudkan tujuan-tujuan FIP, baik dalam hal tanggung jawab sosial atau pun lingkungan. Memahami lanskap pemangku kepentingan ini membantu FIP dalam memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR secara efektif sembari meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas untuk memantau pencapaian kemajuan. Ini juga memastikan upaya-upaya remediasi langsung diarahkan kepada mereka yang mempunyai kekuatan untuk membawa perubahan.

Kebijakan ini mewajibkan dikeluarkannya berbagai jenis informasi, yang ditentukan oleh apakah satu FIP menggunakan kapal atau tidak dan jika menggunakan kapal, apa jenis dan ukuran kapal-kapal tersebut. Dalam FIP yang menggunakan kapal, penting untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki (dan mendapat manfaat finansial dari) kapal serta siapa yang mengoperasikannya di lautan. Informasi ini penting untuk menentukan siapa yang mengemban tanggung jawab akhir dalam hal kondisi kerja, pelatihan, dan risiko di atas kapal.

Melakukan penyesuaian terhadap persyaratan berdasarkan jenis penangkapan ikan dan ukuran kapal juga mencerminkan beragamnya sistem pelacakan informasi dan struktur kelembagaan yang ada dalam berbagai perikanan, khususnya perikanan skala kecil. Menggunakan pendekatan yang berbeda seperti ini memastikan informasi tentang kapal dan nelayan yang dkumpulkan bisa diakses, akurat, dan relevan dengan konteks yang ada serta memungkinkan tercapainya akuntabilitas dan upaya-upaya perbaikan yang efektif dalam berbagai kondisi FIP yang berbeda.

1.3 Melakukan Upaya Terbaik untuk Membuat Nelayan Sadar akan Hak-Hak Mereka

1.3.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP harus berupaya sedapat mungkin untuk membuat para nelayan sadar akan hak-hak mereka, paling tidak termasuk:

- Komitmen dan tanggung jawab yang tercantum dalam Pernyataan Kebijakan FIP (lihat Persyaratan 1.1.
- Tersedianya mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan bagaimana menggunakannya

Untuk memenuhi persyaratan ini, pada awalnya FIP harus menyerahkan semua informasi yang diminta dalam bagian Kesadaran Nelayan akan Hak dalam profil FisheryProgress mereka dan memberikan bukti untuk mendukung tindakan-tindakan yang dipaparkan. Informasi yang harus diberikan meliputi:

- Daftar tindakan yang sudah dilaksanakan, direncanakan, atau sedang dilaksanakan, termasuk kerangka waktu pelaksanaan dan rencana pelaksanaan.
- Bukti untuk mendukung tindakan-tindakan yang ada dalam daftar tersebut.
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan yang diambil dirancang untuk menjangkau semua nelayan yang terlibat dalam penangkapan atau pengangkutan produk FIP
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh nelayan dan dilakukan penyesuaian untuk nelayan yang tidak bisa baca tuli

Disarankan agar aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran yang dilakukan juga mencakup informasi tentang hak-hak nelayan dan perlindungan yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk kerangka kerja instrumen internasional yang telah diratifikasi dan kerangka kerja hukum setempat.

Dalam praktiknya, upaya-upaya ini sedang berjalan. FIP harus memastikan tersedianya informasi terkini untuk nelayan selama FIP aktif di FisheryProgress.

Mendukung Kesadaran Nelayan akan Hak

Ada berbagai pendekatan yang efektif untuk membangun kesadaran nelayan akan hak-hak mereka, termasuk namun tidak terbatas pada memasang pengumuman di atas kapal dan di dermaga, memberikan pelatihan, dan/atau memasukkan informasi tentang Pernyataan Kebijakan FIP dan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dalam dokumen-dokumen perekrutan misalnya kontrak anak buah kapal dan manual pegawai. Serikat pekerja nelayan dan para wakil pekerja lain merupakan pihak yang paling tepat untuk membantu FIP dan para pesertanya untuk memberdayakan nelayan dengan bermakna untuk melaporkan segala pelanggaran terhadap hak-hak mereka melalui mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan.

Membangun kesadaran para nelayan tentang hak-hak mereka bukanlah tanggung jawab satu pemangku kepentingan saja. Sebaliknya, ini merupakan satu upaya bersama dalam komunikasi efektif yang didukung melalui penyampaian pesan secara rutin dari berbagai sumber

Penerapan dan Cakupan

Persyaratan ini berlaku untuk semua FIP yang aktif di FisheryProgress. FIP harus merancang tindakan-tindakan yang mereka laksanakan untuk memenuhi persyaratan ini untuk menjangkau semua nelayan dalam cakupan atau unit FIP (yaitu Unit dari FIP). Ini termasuk semua nelayan yang memanen produk-produk FIP dan memindahkan muatan produk-produk FIP antar kapal, tanpa melihat apakah nelayan dan para pemberi kerja mereka adalah peserta resmi FIP.

Pelaporan Awal

Dalam laporan tahunan pertama mereka setelah masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress, FIP harus:

- Menunjukkan bahwa mereka **mendapatkan status baik** dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan awal dengan:

- Memberikan informasi dan bukti bahwa tindakan-tindakan yang telah mereka laksanakan telah memadai untuk menyampaikan tentang Pernyataan Kebijakan dan ketersediaan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan bahwa tindakan-tindakan dirancang untuk menjangkau semua nelayan dalam Unit di FIP

  ATAU

- Menunjukkan bahwa mereka **sedang berupaya untuk** memenuhi persyaratan awal dengan memberikan informasi yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang direncanakan, sedang dilaksanakan, dan/atau telah selesai dilaksanakan.

ATAU

- Menunjukkan bahwa mereka sedang **berupaya untuk memenuhi** persyaratan awal dengan memberikan informasi yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang direncanakan, sedang dilaksanakan, dan/atau telah selesai dilaksanakan.

Pelaporan Kemajuan

Karena sifat pekerjaan ini yang terus berlangsung, semua FIP harus secara rutin memberikan informasi terbaru tentang upaya-upaya mereka yang berkesinambungan untuk membuat nelayan sadar akan hak-hak mereka. Pelaporan kemajuan bisa mencakup upaya-upaya untuk memastikan nelayan sadar dan memahami komitmen-komitmen FIP dan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang tersedia serta hukum perburuhan setempat dan di tingkat nasional dan segala perlindungan lain yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kerja di FIP.

Isi dan frekuensi pelaporan kemajuan akan berbeda-beda, sebagai berikut:

- Jika FIP **mendapatkan status baik** dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan dalam laporan paling akhir sebelumnya, FIP harus memberikan laporan tahunan dan:
  - Menyerahkan informasi terbaru tentang upaya-upaya yang sedang dilaksanakan ATAU
  - Terus melaporkan pemenuhan Persyaratan 2.1 (setiap tiga tahun) dan 2.2 (setiap enam bulan)

- Jika FIP **sedang mengupayakan** pemenuhan persyaratan dalam laporan paling akhir sebelumnya, FIP harus memberikan laporan setiap enam bulan dan:
    - Menyerahkan informasi yang menunjukkan FIP telah mendapatkan status baik dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan ini ATAU
    - Menyerahkan informasi terbaru tentang tindakan-tindakan yang direncanakan, sedang dilaksanakan, dan/atau sudah selesai dilaksanakan dalam memenuhi persyaratan ini

1.3.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Kesadaran nelayan akan hak-hak mereka dan tersedianya mekanisme bagi mereka untuk membuat laporan dan mendapat pemulihan terhadap pengaduan mereka penting dalam memastikan adanya lingkungan kerja yang aman dan sehat dan bahwa hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi di tempat kerja. Angkatan kerja yang penuh wawasan dan berdaya bisa berfungsi sebagai pemantau tempat kerja yang kuat yang mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi risiko, dan terlibat dengan manajemen untuk selalu meningkatkan kondisi-kondisi kerja.

Keterlibatan secara bermakna dengan para nelayan bisa memakan waktu, oleh karena itu FIP mempunyai pilihan untuk berbagi informasi tentang upaya-upaya mereka dalam memenuhi persyaratan ini. Sebagai contoh, FIP bisa memilih untuk melakukan satu pengkajian yang menyeluruh dan bisa diandalkan tentang angkatan kerja dan mengidentifikasi organisasi yang bergerak dalam hak-hak buruh atau organisasi masyarakat untuk bermitra dalam melibatkan nelayan sebelum melakukan aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran.

Penting untuk diperhatikan bahwa membangun kesadaran para nelayan tentang hak mereka tidak bisa dilakukan satu kali. Ini merupakan satu proses keterlibatan terus menerus dan perbaikan yang berkesinambungan, termasuk untuk FIP yang mendapatkan status baik dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan ini. Sebagai contoh:

- Untuk FIP dengan tingkat pergantian nelayan yang tinggi, aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran dan pelatihan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan nelayan-nelayan baru mendapat pemahaman tentang hak-hak mereka.
- Perubahan komitmen dalam satu FIP, mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang ada, dan juga hukum setempat atau di tingkat regional akan memerlukan pembaruan kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan untuk peningkatan kesadaran.
- Keterlibatan rutin dan khusus, seperti penyegaran, diskusi yang dipandu oleh sesama nelayan, dan bahan-bahan yang mengakomodasi bahasa dan tingkat baca tulis yang berbeda-beda antar nelayan, dapat membantu pemahaman dan keterlibatan yang lebih kuat para nelayan di FIP.

FishChoice sangat mendorong FIP untuk bekerja dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi buruh dan hak asasi manusia setempat, perwakilan para pekerja (jika ada), dan badan-badan pemerintah terkait untuk memenuhi persyaratan ini. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai posisi yang paling tepat untuk membantu para peserta FIP untuk memahami bagaimana menyampaikan kepada para nelayan tentang hak-hak mereka dengan cara yang memberdayakan. Badan-badan, organisasi-organisasi, dan para perwakilan tersebut juga berada di posisi yang paling tepat untuk mendukung FIP dan nelayan dalam memahami cara-cara terbaik untuk melaporkan dan mendapatkan pemulihan dari berbagai jenis pengaduan atau menangani pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia jika hal itu terjadi. Dalam kasus dimana sejumlah atau semua nelayan dalam FIP merupakan anggota satu serikat pekerja dan/atau diatur oleh perjanjian perundingan bersama, FIP semestinya menyertakan informasi dan bukti adanya perjanjian dan aktivitas-aktivitas serikat pekerja yang mendukung kesadaran hak nelayan tersebut dalam profil FisheryProgress mereka untuk persyaratan ini.

1.4 Mengkaji Ketersediaan dan Keefektifan Mekanisme-Mekanisme Pengajuan dan Penanganan Pengaduan untuk para Nelayan dalam FIP

1.4.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP harus mengkaji ketersediaan dan keefektifan sistem-sistem yang ada, misalnya mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan, untuk semua nelayan yang memanen dan memindahkan muatan produk FIP antar kapal untuk bisa menyampaikan permasalahan dan menyelesaikannya. Mekanisme dan sistem yang ada untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan akan berbeda-beda antar FIP dan sesuai dengan konteks masing-masing. Tujuannya adalah agar FIP memahami sejauh mana nelayan memiliki cara untuk melaporkan pengaduan tepat pada waktunya[17], sejauh mana mekanisme tersebut efektif, dan area apa yang perlu diperbaiki dari sistem-sistem yang ada. Untuk memenuhi persyaratan ini, FIP harus mengisi formulir pengkajian ringkas mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan memberikan bukti adanya mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan jika ada.

Penerapan dan Cakupan

Persyaratan ini berlaku untuk semua FIP yang aktif di FisheryProgress.

Pengkajian terhadap mekanisme-mekanisme dan proses-proses untuk mengatasi pengaduan dan sengketa, serta pengkajian terkait tentang keefektifannya, harus mempertimbangkan semua nelayan dalam cakupan atau unit FIP (yaitu Unit dari FIP). Ini mencakup semua nelayan yang memanen dan melakukan pemindahan muatan produk FIP antar kapal, tanpa memandang apakah para nelayan dan yang memperkerjakan mereka merupakan peserta resmi FIP atau tidak.

[17] Untuk tujuan persyaratan ini, "tepat pada waktunya" artinya paling tidak satu kali dalam setiap 24 jam, tanpa melihat apakah mereka di daratan atau di lautan.

Pelaporan Awal

Dalam pelaporan tahunan pertama mereka setelah masuk daftar sebagai FIP yang aktif di FisheryProgress, FIP harus:

- **Menunjukkan bahwa** mereka **mendapatkan status baik** dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan awal dengan:
  - Menyerahkan formulir pengkajian ringkas mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dengan melengkapi semua bidang isian tentang pengkajian dan penilaian awal tentang keefektifan serta bukti pendukung[18] ATAU
  - Menyerahkan SRA sebagai pengganti pelaporan langsung tentang pemenuhan persyaratan ini

ATAU

- Menunjukkan bahwa mereka **sedang berupaya** untuk memenuhi persyaratan awal dengan memberikan informasi dan bukti yang berkenaan dengan tindakan-tindakan yang telah selesai dilaksanakan dan yang direncanakan untuk menyelesaikan pengkajian awal dan penilaian tentang keefektifan.

[18] Lihat Pedoman Tinjauan FIP untuk panduan tambahan.

Pelaporan Kemajuan

Semua FIP harus memberikan informasi terkini secara rutin tentang ketersediaan mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan keefektifannya.

Isi dan frekuensi pelaporan kemajuan akan berbeda-beda, sebagai berikut:

- Jika FIP mendapatkan status baik dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan dalam laporan paling akhir sebelumnya, FIP harus memberikan laporan tahunan dan:
    - Melengkapi semua bidang isian dalam formulir penilaian yang sedang berjalan, yang termasuk mengidentifikasi segala perubahan terhadap mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang tersedia untuk nelayan dan satu penilaian singkat yang sudah diperbarui tentang keefektifan mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan tersebut dan/atau proses-proses sengketa, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti sejauh mana mekanisme digunakan, aksesibilitasnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pengaduan, dan tantangan-tantangan dan/atau keberhasilan-keberhasilan umum ATAU
    - Terus melakukan pelaporan tentang Persyaratan 2.1 (setiap tiga tahun) dan 2.2 (setiap enam bulan)

Definisi

Mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan: Satu proses pengaduan dan remediasi resmi yang legal atau non-legal yang dapat digunakan oleh nelayan yang terdampak negatif oleh aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan usaha/bisnis tertentu.

Remediasi: Proses penyediaan pemulihan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hasil nyata yang dapat menangani, atau memperbaiki dampak negatif dari pelanggaran tersebut (Sumber: Didasarkan pada Shift/Mazars LLP).

- Jika FIP **sedang berupaya** untuk memenuhi persyaratan dalam laporan paling akhir sebelumnya, FIP harus memberikan laporan setiap enam bulan dan
  - Memberikan bukti yang menunjukkan FIP mendapatkan status baik dengan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dan sejalan dengan persyaratan ini, termasuk formulir pengkajian ringkas mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan ATAU
  - Memberikan informasi terbaru tentang kemajuan tindakan-tindakan yang telah selesai dilaksanakan, sedang dilaksankaan, dan/atau direncanakan dalam upaya memenuhi persyaratan ini.

1.4.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Sistem-sistem pengajuan dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa mempunyai peran penting dalam berbagai konteks, mulai dari urusan ketenagakerjaan formal hingga koperasi nelayan mandiri. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan para peserta FIP dan para pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang kuat tentang kemampuan nelayan untuk melaporkan permasalahan di daratan atau di lautan, proses-proses yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut atau melakukan remediasi kerugian, dan peluang untuk meningkatkan ketersediaan dan keefektifan proses-proses ini untuk nelayan dalam FIP.

Pengkajian awal tentang ketersediaan sistem-sistem pengajuan dan penanganan pengaduan dan/atau penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut sebagai mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan) dan penilaian tahunan rutin tentang keefektifan sistem-sistem tersebut mendukung tercapainya peningkatan sistem-sistem tersebut secara terus menerus di dalam FIP. FIP yang menyerahkan satu SRA[19] bisa menggunakan rencana kerja sosial mereka untuk melaporkan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan, ketersediaan, kemudahan akses, dan keefektifan sistem-sistem ini untuk para nelayan FIP. FishChoice mendorong FIP untuk menyusun rencana kerja perbaikan yang berkenaan dengan sistem penanganan pengaduan, bahkan jika tidak diwajibkan oleh Kebijakan ini.

Berbagai entitas bisa menjalankan dan mengelola mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan untuk para nelayan di dalam FIP. Sebagian FIP akan bisa mengidentifikasi, menilai keefektifan dan memilih untuk mendukung perbaikan terhadap mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang ada di dalam perusahaan di dalam rantai pasok, badan-badan pemerintah, atau serikat pekerja. Sebagian FIP lain bisa saja menemukan bahwa tidak ada mekanisme yang tersedia untuk nelayan di dalam FIP atau ada satu mekanisme yang berlaku hanya untuk sebagian nelayan tertentu. Dalam hal ini, FishChoice mendorong FIP untuk mengidentifikasi mitra-mitra yang tepat untuk mengembangkan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang mudah diakses, efektif; dan jika memungkinkan, mengikat secara hukum.

[19] FIP yang menyerahkan satu pengkajian alternatif tetap harus memberikan laporan tentang pemenuhan Persyaratan 1.4.

FishChoice mengakui bahwa mekanisme-mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dapat dan semestinya berbeda-beda sesuai dengan kondisi khusus setiap peserta FIP. FishChoice mengakui bahwa, misalnya, pengaduan yang disampaikan dalam situasi kerja formal bisa berbeda dari pengaduan yang disampaikan dalam konteks koperasi para nelayan mandiri. Meskipun demikian, karakteristik mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang memadai yang disampaikan di sini bersifat universal. Persyaratan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman model-model FIP dengan memungkinkan para koordinator dan peserta FIP untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keefektifan sistem apa pun yang digunakan dalam Unit dari FIP untuk melaporkan pengaduan para nelayan dan mendapatkan pemulihan. Dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), terdapat daftar kriteria keefektifan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan yang dilandasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dalam templat evaluasi terhadap sistem-sistem ini. UNGP menekankan pentingnya para pekerja dan para pemangku kepentingan yang terdampak untuk bisa mengajukan pengaduan dan melaporkan pelanggaran hak dengan aman.

Karakteristik Mekanisme Pengajuan dan Penanganan Pengaduan yang Memadai

Seperti yang diuraikan dalam UNGP, baik mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan non-yudisial berbasis negara maupun non-negara harus memiliki legitimasi, mudah diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai dengan hak-hak, menjadi sumber pembelajaran terus menerus, dan didasarkan pada keterlibatan dan dialog. Akan menjadi praktik unggulan jika nelayan terlibat dalam pengembangan mekanisme pengajuan dan penanganan pengaduan dan mempunyai sejumlah saluran untuk pelaporan, termasuk pelaporan langsung di tempat kerja dan/atau melalui lembaga-lembaga eksternal. Di banyak negara, ada sistem-sistem yang dijalankan oleh serikat pekerja, LSM, kelompok industri (termasuk pemasok dan pengecer/pemilik merek), atau plaftorm-platform pemerintah tempat nelayan bisa mendapatkan pemulihan dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

1.5 Melaksanakan satu Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria FisheryProgress adanya Peningkatan Risiko Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

1.5.1 RINCIAN PERSYARATAN

FishChoice telah mengembangkan serangkaian kriteria untuk mengkaji faktor-faktor situasional yang meningkatkan risiko kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja dan manusia dalam satu perikanan. FIP harus menyelesaikan satu evaluasi mandiri dengan mengunakan kriteria-kriteria tersebut dengan melengkapi Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria Risiko dalam profil FisheryProgress mereka. Kriteria peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia dalam evaluasi mandiri adalah:

1. Ada **pemindahan muatan** di lautan antar kapal besar dalam FIP.
2. FIP memiliki satu atau lebih dari satu kapal dengan jumlah pekerja migran asing yang banyak (yaitu 25% atau lebih nelayan yang bukan merupakan warga negara bendera kapal[20]).
3. FIP mempunyai satu atau lebih dari satu kapal yang **melakukan perjalanan penangkapan ikan** selama lebih dari 90 hari berturut-turut.
4. FIP mempunyai laporan adanya insiden[21] kerja paksa, pekerja anak, atau perdagangan manusia selama dua tahun terakhir.
5. FIP tidak mempunyai informasi yang memadai untuk menentukan apakah mereka memenuhi kriteria di atas

FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria ini harus menyelesaikan Komponen 2 yang diuraikan dalam kebijakan HRSR ini.

[20] Untuk tujuan Kriteria Risiko 2, para warga negara Uni Eropa yang bekerja di atas kapal berbendera negara Uni Eropa bisa dianggap sebagai warga dari negara yang benderanya digunakan di atas kapal, yaitu mereka tidak masuk hitungan sebagai angkatan kerja migran asing.
[21] Silahkan mengacu pada Proses FisheryProgress untuk Mengatasi Permasalahan tentang Informasi IFP untuk mendapatkan rincian tentang apa yang dimaksud dengan “insiden yang dilaporkan".

Definisi

Pemindahan muatan antar kapal: Pembongkaran barang dan/atau nelayan dari satu kapal dan memuatnya ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya.

Perjalanan penangkapan ikan: Segala perjalanan di mana penangkapan ikan dilakukan. Durasi perjalanan penangkapan ikan mencakup seluruh waktu yang dihabiskan di luar pelabuhan asal. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, waktu yang dihabiskan di lautan, bersandar di pelabuhan luar negeri, waktu perendaman, dan waktu beristirahat di tempat terpencil yang tidak memiliki akses komunikasi.

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress harus memenuhi persyaratan ini.

Respons terhadap kriteria risiko harus mencakup semua kapal dan nelayan dalam cakupan atau unit FIP (yaitu Unit dari FIP). Ini termasuk semua nelayan dan kapal yang memanen atau melakukan pemindahan muatan produk FIP antar kapal, tanpa memandang apakah mereka merupakan peserta resmi FIP atau tidak.

Pelaporan Awal

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

Pelaporan Kemajuan

FIP harus mengulang Evaluasi Mandiri terhadap Kriteria Risiko setiap tahun sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.

1.5.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Sejumlah faktor-faktor situasional, termasuk pemindahan muatan antar kapal, angkatan kerja migran, dan perpanjangan waktu berlayar di lautan, ada hubungannya dengan meningkatnya risiko[22] terjadinya kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Sebagai contoh, risiko adanya pelanggaran terhadap hak-hak seperti itu lebih tinggi dalam situasi di mana kapal berlayar dalam jangka waktu yang berkepanjangan di lautan dan/atau bersandar di pelabuhan asing. Dalam contoh-contoh seperti itu, pihak berwenang mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan dan dengan sendirinya kebebasan nelayan untuk bergerak dibatasi. Kriteria di atas bertujuan untuk mengidentifikasi FIP-FIP mana yang ada dalam daftar FisheryProgress yang bisa menghadapi risiko-risiko situasional seperti itu dan oleh karenanya perlu melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang risiko khusus yang dihadapi FIP.

FishChoice mendorong FIP untuk secara independen menggunakan data yang sudah diverifikasi, triangulasi data, dan/atau tenaga ahli yang berkualifikasi untuk menentukan respons terhadap kriteria. Namun demikian, FishChoice mempunyai persyaratan-persyaratan khusus tentang siapa yang harus melakukan evaluasi mandiri terhadap kriteria risiko.

Memahami Risiko

Penting untuk diperhatikan bahwa memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria risiko tidak berarti bahwa satu FIP tertentu berisiko tinggi terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sama halnya, tidak memenuhi satu pun kriteria risiko tidak berarti bahwa satu FIP menghadapi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia yang rendah. Kriteria risiko menekankan konteks di mana FIP beroperasi. Satu-satunya cara untuk menentukan tingkat risiko sesungguhnya satu FIP tertentu adalah dengan melakukan satu pengkajian risiko yang terperinci.

[22] Walk Free. (2018). Fishing | Global Slavery Index. Global Slavery Index.

KOMPONEN 2: PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK FIP YANG MEMENUHI KRITERIA RISIKO

KOMPONEN 2: PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK FIP YANG MEMENUHI KRITERIA RISIKO

2.1 Melaksanakan satu Pengkajian Risiko

2.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP yang beroperasi dalam konteks dengan risiko lebih tinggi, yang artinya memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5), harus melakukan satu pengkajian risiko. Mereka bisa memenuhi Persyaratan 2.1 dengan salah satu dari dua cara berikut

1. Melaksanakan satu pengkajian risiko menggunakan alat SRA. FIP bisa melakukan satu SRA terhadap Indikator-Indikator Inti SRA[23] FisheryProgress (lihat Lampiran A untuk rincian lebih lanjut) yang memenuhi kriteria berikut:

a. Pengkajian harus dilakukan dengan menggunakan Templat Pengkajian Risiko FisheryProgress atau Templat Pengkajian Alat SRA.[24],[25]

b. Seorang konsultan bidang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial yang berkualifikasi yang telah disetujui sebelumnya[26] harus melaksanakan pengkajian.

c. Pengkajian harus mencakup konsultasi dengan para nelayan dan para wakil nelayan, misalnya serikat pekerja nelayan atau organisasi nelayan, LSM-LSM yang bergerak di bidang hak buruh, atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang mewakili nelayan.

Catatan: Dalam Kebijakan HRSR ini, pilihan ini disebut sebagai pelaksanaan satu SRA.

[23] Penilaian risiko juga dapat secara opsional mencakup Indikator Non-Inti SRA (lihat Komponen 3).
[24] Silahkan melihat dua templat tersebut di bagian templat di dashboard pengguna.
[25] FIP yang telah menjalani satu audit formal sebagai bagian dari satu standar atau program sosial yang diakui bisa menggunakan data yang diperoleh dari audit tersebut untuk mendapatkan skor untuk indikator inti FisheryProgress yang terkait dalam SRA. Untuk itu, FIP harus menggunakan panduan pemetaan kesetaraan yang dipublikasikan yang dirancang untuk standar mereka dan SRA.
[26] Sebelum SRA dilaksanakan, FIP harus menghubungi FishChoice untuk menegaskan bahwa konsultan yang terpilih memenuhi kualifikasi FisheryProgress. Ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya bisa mengakibatkan adanya biaya tambahan yang harus ditanggung FIP karena perlunya untuk melakukan pengkajian ulang oleh satu pengkaji yang berkualifikasi dan potensi perlunya dipindahkan ke status tidak aktif karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan awal. Untuk rincian lebih lanjut tentang kualifikasi konsultan, silahkan mengacu ke sini.

2. **Menyerahkan satu hasil pengkajian alternatif.** FIP bisa memberikan dokumentasi dilakukannya satu pengkajian alternatif (misalnya pengkajian risiko sosial, pra-pengkajian, atau audit sebagai bagian dari satu standar sosial atau program sertifikasi, penelitian/kajian terakhir, atau hasil dari satu kemitraan dengan satu organisasi perburuhan atau hak asasi manusia yang fokus untuk mengidentifikasi risiko-risiko dan mengatasinya).

   a. FIP harus menyerahkan hasil pengkajian alternatif (jika pengkajian mencakup informasi tentang bidang-bidang risiko) atau satu rangkuman temuan pengkajian alternatif.

   b. FIP harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Ringkas Pengkajian Alternatif, yang membantu dalam pengumpulan informasi baku tentang pengkajian alternatif dari semua FIP yang memilih untuk mengikuti jalur ini.[27]

   c. Pengkajian alternatif paling tidak harus mencakup tema-tema berikut: Kerja Paksa (SRA1.1.2), Perdagangan Manusia dan Perekrutan yang Adil (SRA1.1.3), Kerja Ijon di Perikanan Skala Kecil (SRA1.1.4), Pekerja Anak (SRA1.1.5), Pelaporan Pengaduan dan Akses ke Pemulihan[28] (SRA2.1.1).

[27] Perlu diingat bahwa pengkajian alternatif tidak harus dilakukan oleh konsultan HRSR yang berkualifikasi, namun FishChoice sangat menyarankan untuk menggunakan konsultan seperti itu.
[28] Ini termasuk pengkajian tentang ketersediaan dan akses ke Wi-Fi untuk kapal yang melakukan perjalanan penangkapan ikan lebih dari 24 jam.

Alat SRA dalam Sektor Seafood

SRA merupakan satu alat untuk diagnosis, pembandingan menggunakan tolok ukur, dan pengkajian risiko untuk membantu uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasok produk pangan laut (seafood). Alat SRA dikembangkan oleh satu koalisi luas yang terdiri dari para tenaga ahli dalam bidang konservasi dan tanggung jawab sosial, yang mengacu pada standar-standar tanggung jawab sosial yang diakui secara luas dalam menyusun serangkaian indikator yang menyeluruh untuk kinerja sosial yang bisa diterapkan di dalam perikanan skala besar dan skala kecil.

Alat SRA menggunakan "Kerangka Kerja Monterey"[29], yaitu satu definisi bersama tentang tanggung jawab sosial yang mencakup:

- Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya.
- Memastikan kesetaraan dan keadilan peluang untuk mendapatkan manfaat.
- Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan penghidupan.

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia harus memenuhi persyaratan ini.

Dalam kaitannya dengan cakupan pengkajian:

- SRA harus selaras dengan cakupan atau unit (yaitu Unit dari FIP) FIP dan harus didasarkan pada sampel yang mewakili semua kapal dan nelayan dalam cakupan FIP. Ini termasuk semua nelayan yang memanen atau memindahkan muatan produk FIP antar kapal, tanpa melihat apakah kapal dan nelayan merupakan peserta resmi FIP.
- Segala pengkajian alternatif harus menjelaskan cakupan pengkajian alternatif tersebut dan apa relevansinya dengan FIP.

[29] Kittinger, J. N., Teh, L. C. L., Allison, E. H., Bennett, N. J., Crowder, L. B., Finkbeiner, E. M., Hicks, C., Scarton, C. G., Nakamura, K., Ota, Y., Young, J., Alifano, A., Apel, A., Arbib, A., Bishop, L., Boyle, M., Cisneros-Montemayor, A. M., Hunter, P., Le Cornu, E., … Wilhelm, T. A. (2017). Committing to socially responsible seafood: Science, 356(6341), 912–913. https://doi.org/10.1126/science.aam9969

Pelaporan Awal

Begitu laporan-laporan FIP memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP mempunyai waktu 12 bulan untuk memenuhi persyaratan tentang pengkajian risiko.

Pelaporan Kemajuan

1. **FIP harus melakukan pengkajian di masa mendatang, sebagai berikut:**
    a. FIP yang melaksanakan satu SRA harus mengulang pengkajian risiko dengan didasarkan pada semua Indikator Inti SRA FisheryProgress setiap tiga tahun sekali.
    b. FIP yang melaksanakan satu pengkajian alternatif harus memberikan satu hasil terkini dari pengkajian yang mencakup semua tema minimum yang disyaratkan setiap tiga tahun sekali.
2. **Untuk semua FIP:** Jika terjadi perubahan besar dalam satu FIP sedemikian rupa sehingga SRA yang sudah ada tidak bisa lagi dianggap mewakili FIP tersebut atau sedemikian rupa sehingga sehingga pengkajian alternatif tidak lagi relevan untuk FIP tersebut, FIP tersebut harus melakukan satu pengkajian baru dalam 12 bulan sejak perubahan-perubahan tersebut dilaporkan. Untuk tambahan informasi, silahkan melihat Pedoman Tinjauan FIP.

2.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria dalam Persyaratan 1.5 tentang adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia dalam perikanan harus melakukan satu pengkajian risiko untuk memahami tingkat risiko yang sesungguhnya dalam FIP. Persyaratan ini menggunakan metode-metode dan alat-alat yang sesuai dengan konteks perikanan dengan merekomendasikan alat SRA sebagai landasan untuk pengkajian risiko.

FishChoice mengakui bahwa tanpa faktor-faktor situasional seperti ini pun, FIP masih tetap bisa menghadapi risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia dan oleh karena itu FishChoice mendorong semua FIP untuk melakukan satu pengkajian risiko dan dengan sukarela memenuhi Persyaratan 2.1 (lihat Komponen 3).

Meskipun SRA merupakan alat pengkajian yang direkomendasikan, FishChoice mengakui bahwa SRA mungkin tidak selalu menjadi alat yang paling tepat karena beragamnya konteks dan anggaran. Karena itu, FIP bisa memilih untuk menyerahkan hasil pengkajian alternatif yang mengidentifikasi isu-isu dan risiko-risiko sosial yang menjadi prioritas. Namun demikian, FishChoice mensyaratkan serangkaian tema dan wilayah risiko minimum yang harus dikaji tanpa memandang jenis pengkajian yang dilakukan. Tema-tema wajib ini berkaitan dengan segala bentuk pelanggaran hak yang paling berat: kerja paksa, perdagangan manusia, kerja ijon, pekerja anak, dan pelaporan pengaduan/akses ke pemulihan.

FIP juga bisa menggunakan pengkajian alternatif sebagai input utama untuk SRA. FIP dapat memanfaatkan data dari pengkajian alternatif mana pun (misalnya hasil audit lain, internal dan/atau eksternal; pra-pengkajian; pengkajian risiko sosial; atau kajian penelitian terakhir) sebagai satu sumber bukti tunggal (data sekunder) untuk mengawali evaluasi/menentukan skor pada indikator-indikator SRA.[30]

[30] Lihat panduan tentang bagaimana menggunakan pengkajian alternatif sebagai masukan bagi SRA dalam Pedoman untuk Menggunakan Data Audit atau Pengkajian yang Ada dalam Pengkajian Risiko berbasis SRA yang ada di dahsboard pengguna di bawah tab Sumber Daya.

FIP yang telah menjalani audit sosial resmi bisa menggunakan proses pemetaan penyetaraan untuk menggunakan data yang diperoleh dari audit formal berdasarkan salah satu standar yang diakui ini untuk menyelesaikan SRA.[31] Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dengan menggunakan data dari pihak ketiga dalam proses ini, FIP dengan sadar telah menerima risiko yang berkaitan dengan akurasi dan temuan. Testimoni dari nelayan dan pekerja sangat penting untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan para pengkaji semestinya sangat paham akan adanya kesenjangan ini dan membuat pertimbangan yang kuat tentang bagaimana caranya melengkapi proses pemetaan penyetaraan dengan melibatkan pekerja secara bermakna.

Memahami dan Menyoroti para Pemangku Kepentingan Sosial FIP

Selain melibatkan para nelayan dan para wakil mereka untuk menyelesaikan pengkajian risiko, FishChoice merekomendasikan para konsultan HRSR untuk memberikan daftar lengkap para pemangku kepentingan sosial yang mempunyai kepentingan terhadap atau yang terkena dampak FIP. Ini bisa termasuk badan-badan pemerintah setempat, lembaga-lembaga pembangunan internasional, asosiasi industri, dan lain-lain. Sebagai bagian dari laporan pengkajian risiko akhir, para konsultan HRSR semestinya menyertakan gambaran umum tentang para pemangku kepentingan sosial, tentang bagaimana mereka terlibat dalam pengkajian, dan bagaimana FIP berdampak pada mereka. Jika dilakukan, ini menjadi satu cara yang yang baik bagi FIP untuk menunjukkan bahwa mereka memahami lanskap para pemangku kepentingan di mana FIP beroperasi dan melakukan upaya-upaya untuk melibatkan para pemangku kepentingan tersebebut.

[31] Panduan penyetaraan dan sumber daya lain bisa didapatkan di dashboard pengguna di bawah tab Sumber Daya dan informasi lebih lanjut tentang proses-proses bisa dilihat di Pedoman Tinjauan FIP.

2.2 Menyusun dan Melaksanakan satu Rencana Kerja Sosial

2.2.1 RINCIAN PERSYARATAN

Jika berlaku, FIP harus menyusun dan menjalankan satu rencana kerja untuk mengatasi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pengkajian risiko sosial mereka (lihat Persyaratan 2.1). FishChoice mendorong proses-proses penyusunan besama untuk memastikan rencana kerja layak untuk diwujudkan dan cepat tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan mereka yang paling terdampak. Apakah rencana kerja harus disusun dan jenis rencana kerja seperti apa yang diterima akan berbeda-beda, yang ditentukan oleh pendekatan pengkajian risiko yang diikuti FIP menurut Persyaratan 2.1 di atas. Secara khusus:

1. **Untuk FIP yang telah menyelesaikan SRA:**
   a. Untuk semua indikator dengan skor untuk risiko tinggi, FIP harus menyusun satu rencana kerja yang memaparkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki skor sehingga paling tidak menjadi tingkat risiko sedang pada alat SRA.

   b. FIP harus menggunakan templat rencana kerja sosial FisheryProgress[32] untuk mendokumentasikan rencana kerja mereka dan mengunggahnya di bagian Dokumen dalam bagian Persyaratan Kebijakan HRSR di Profil FisheryProgress mereka. Selain itu, FIP harus menyerahkan hasil pelaksanaan rencana kerja sosial mereka di bagian rencana kerja sosial dalam profil FisheryProgress mereka. Seorang konsultan yang mempunyai kualifikasi dalam bidang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial yang telah disetujui sebelumnya harus ditunjuk untuk memimpin penyusunan rencana kerja tersebut.[33]

   c. FIP yang mempunyai skor untuk risiko rendah atau sedang untuk semua indikator tidak diwajibkan untuk menyusun satu rencana kerja sosial. Meskipun demikian, direkomendasikan agar mereka menyusun satu rencana kerja sosial untuk indikator-indikator dengan skor untuk resiko sedang.

[32] Semua templat pelaporan bisa dilihat di bagian templat dalam dashboard pengguna.
[33] Sebelum menyusun rencana kerja, FIP harus menghubungi FishChoice untuk menegaskan bahwa konsultan yang terpilih memenuhi kualifikasi FisheryProgress. Ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya bisa mengakibatkan adanya biaya tambahan yang harus ditanggung FIP karena perlunya untuk menyusun ulang rencana kerja dengan melibatkan satu konsultan yang berkualifikasi dan kemungkinan perlunya untuk dipindahkan ke status tidak aktif karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan awal. Untuk rincian lebih lanjut tentang kualifikasi konsultan, silahkan mengacu ke sini.

2. **Untuk FIP yang telah menyerahkan hasil pengkajian alternatif:**
   a. FIP harus menyerahkan satu rencana kerja atau rencana aksi perbaikan yang berkaitan dengan temuan-temuan pengkajian alternatif. Rencana kerja harus mencakup segala temuan dan risiko yang berkaitan dengan tema-tema wajib minimum seperti yang dipaparkan di Persyaratan 2.1.
   b. FIP harus menggunakan templat rencana kerja sosial FisheryProgress untuk mendokumentasikan rencana kerja mereka dan mengunggahnya di bagian Dokumen dalam bagian Persyaratan Kebijakan HRSR di Profil FisheryProgress mereka. Selain itu itu, FIP harus menyerahkan rencana kerja sosial mereka di bagian rencana kerja sosial dalam profil FisheryProgress mereka.

Menyusun Rencana Kerja Sosial

Merupakan praktik unggulan jika semua pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja. FIP semestinya menyampaikan hasil-hasil pengkajian risiko kepada pemilik kapal, kapten kapal, juru mudi, nelayan, wakil nelayan, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Rencana kerja akan paling berhasil jika semua pemangku kepentingan terkait ikut berperan dalam penyusunannya, mempunyai rasa memiliki terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan, dan mempunyai peran yang ditentukan dengan jelas dalam pelaksanaannya.

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang menyelesaikan SRA dengan indikator-indikator dengan skor untuk risiko tinggi atau menyerahkan pengkajian alternatif harus memenuhi persyaratan ini.

Untuk FIP yang menyelesaikan SRA, cakupan rencana kerja harus didasarkan pada cakupan temuan-temuan pengkajian. FIP yang memilih untuk menggunakan satu pengkajian alternatif harus memberikan penjelasan tentang relevansi rencana kerja mereka dengan pengkajian mereka.[34]

[34] Penjelasan tentang relevansi merupakan satu bidang isian yang wajib diisi dalam templat rencana kerja sosial.

Pelaporan Awal

Begitu satu FIP melaporkan telah memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia, FIP tersebut mempunyai waktu hingga 18 bulan untuk menyelesaikan rencana kerja sosial tersebut. FishChoice mendorong FIP untuk menyampaikan rencana kerja mereka pada waktu yang sama dengan hasil pengkajian risiko mereka (lihat Persyaratan 2.1) namun juga bisa menyerahkan rencana kerja enam bulan setelah pengkajian apabila mereka memperlukan lebih banyak waktu.

Pelaporan Kemajuan

1. **Untuk FIP yang telah menyelesaikan SRA:** FIP harus melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana kerja sosial setiap enam bulan, sebagai bagian dari laporan enam bulanan dan tahunan yang sudah ada sampai SRA tahunan mereka menunjukkan bahwa semua indikator telah mendapatkan skor untuk risiko rendah atau sedang[35] FIP harus memberikan laporan berikut selama laporan enam bulanan dan tahunan mereka:
    a. **Laporan enam bulanan.** FIP harus melaporkan kemajuan pelaksanaan tindakan-tindakan yang tercantum dalam rencana kerja sosial mereka dan memberikan bukti kemajuan yang dilaporkan.
    b. **Laporan tahunan. FIP harus:**
        i. Melaporkan kemajuan pelaksanaan tindakan-tindakan yang tercantum dalam rencana kerja sosial mereka dan memberikan bukti kemajuan yang dilaporkan.
        ii. Memperbarui rencana kerja agar mencerminkan skor-skor indikator yang paling baru jika FIP memilih untuk menyerahkan satu SRA yang sudah diperbarui.
2. **Untuk FIP yang telah menyerahkan satu pengkajian alternatif:**
    a. FIP harus melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana kerja sosial setiap enam bulan, sebagai bagian dari laporan enam bulanan dan tahunan mereka serta menyerahkan bukti kemajuan yang dilaporkan. FIP juga harus terus memberikan laporan kemajuan pelaksanaan rencana kerja mereka hingga pengkajian ulang tiga tahunan dilakukan dan rencana kerja mereka diperbarui berdasarkan temuan-temuan dari pengkajian yang baru.

[35] FIP bisa dengan sukarela terus memberikan laporan tentang indikator-indikator setelah mereka mencapai skor untuk risiko sedang atau rendah.

© COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD, A.C. (COBI)

Definisi

Rencana kerja sosial: Merupakan satu daftar tindakan yang akan dilaksanakan FIP, baik untuk mengatasi kekurangan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR atau untuk mengatasi wilayah-wilayah risiko yang teridentifikasi dalam pengkajian risiko oleh FIP. Rencana kerja harus mencakup semua organisasi atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tindakan dan tenggat bulan dan tahun untuk pelaksanaan setiap tindakan. FIP juga bisa menyertakan satu rincian tugas-tugas khusus dalam setiap tindakan.

2.2.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Pada dasarnya, FIP merupakan satu alat untuk perbaikan berkelanjutan. Mewajibkan FIP untuk menyusun dan melaksanakan satu rencana kerja sosial memastikan bahwa mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi nelayan – khususnya risiko-risiko yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh – bukan hanya dikaji namun juga ditangani dengan aktif. Rencana kerja sosial berfungsi sebagai satu peta jalan untuk kemajuan dan akuntabilitas yang terukur dan sejalan dengan pendekatan perbaikan terstruktur yang sudah melekat dalam persyaratan lingkungan FIP. FishChoice mendorong adanya proses-proses kolaboratif untuk memastikan rencana kerja layak untuk dilaksanakan dan cepat tanggap terhadap kebutuhan dan sudut pandang mereka yang paling terkena dampak.

Persyaratan ini menegaskan pentingnya menggunakan temuan-temuan dari pengkajian risiko untuk memandu pelaksanaan tindakan. Untuk FIP yang menggunakan alat Pengkajian Risiko Sosial (SRA), rencana kerja difokuskan untuk mengurangi skor-skor untuk risiko tinggi paling tidak menjadi tingkat sedang. Untuk FIP yang menyerahkan pengkajian alternatif, rencana kerja atau rencana aksi perbaikan harus menjawab langsung pada permasalahan dan wilayah-wilayah risiko yang diidentifikasi melalui proses tersebut. Dalam dua kasus tersebut, rencana kerja memungkinkan FIP untuk beralih dari memahami risiko ke menangani risiko-risiko dengan jelas, terdokumenteasi, dan dapat dilacak.

Rencana kerja juga membantu adanya transparansi sehingga para pemangku kepentingan bisa melihat bagaimana FIP merespons pada potensi risiko yang mengancam hak dan kesejahteraan nelayan. Pelaporan kemajuan secara terus menerus memastikan rencana kerja tidak bersifat statis namun berkembang sejalan dengan data baru, pembaruan pengkajian, atau tantangan-tantangan yang muncul dalam perikanan. Oleh karena itu, persyaratan ini bukan hanya mendukung FIP untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi nelayan namun juga membantu FIP untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kepemimpinan dalam tanggung jawab sosial.

KOMPONEN 3: PERSYARATAN TENTANG PELAPORAN SUKARELA

KOMPONEN 3: PERSYARATAN TENTANG PELAPORAN SUKARELA

3.1 Pelaporan tentang Pengkajian Risiko dan Rencana Kerja Sukarela

Kebijakan HRSR in fokus pada serangkaian persyaratan inti untuk semua FIP dan persyaratan-persyaratan tambahan untuk FIP-FIP yang memenuhi kriteria adanya peningkatan risko kerja paksa dan perdagangan manusia karena faktor-faktor situasional.

FishChoice mengakui bahwa FIP mana pun bisa saja mempunyai bidang-bidang dengan risiko tinggi dan berpotensi terjadinya kekerasan, bahkan jika FIP tidak memenuhi kriteria risiko khusus yang ada dalam Persyaratan 1.5. Juga ada permasalahan lain tentang tanggung jawab sosial di luar hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh inti dalam Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress,[36] misalnya ketahanan pangan dan penghidupan. Oleh karena itu FishChoice mendorong semua FIP yang terdaftar di FisheryProgress untuk mengkaji risiko sosial mereka dan melaporkan upaya-upaya mereka untuk mengatasinya. Dengan memberikan laporan secara sukarela, FIP bisa menunjukkan kepemimpinan mereka dalam mengadopsi praktik-praktik unggulan dan memenuhi persyaratan-persyaratan uji tuntas hak asasi manusia dari pembeli seafood.

Ada dua kategori FIP yang memberikan laporan sukarela:

1. FIP yang **tidak** diwajibkan untuk memenuhi Persyaratan 2.1 dan 2.2 namun secara sukarela memilih untuk memenuhinya.
2. FIP yang **diwajibkan** untuk memenuhi Persyaratan 2.1 dan 2.2 namun secara sukarela memilih untuk mengkaji dan memberikan laporan tentang tema-tema risiko, tindakan rencana kerja, dan/atau kemajuan melebihi dari yang diwajibkan.[37]

[36] Lihat Lampiran A yang berisi daftar lengkap topik dan indikator SRA.
[37] Ini bisa dalam banyak bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada: Satu FIP bisa memperluas cakupan pengkajian risiko mereka agar mencakup tema-tema melampaui tema-tema minimum; satu FIP yang menggunakan SRA bisa memilih untuk mencakup indikator-indikator dengan skor untuk risiko sedang dalam rencana kerjanya; atau satu FIP yang melaksanakan satu SRA dengan fokus pada Indikator-Indikator Inti SRA FisheryProgress bisa menyerahkan satu pengkajian alternatif yang mengkaji tema-tema tambahan.

3.1.1 RINCIAN PERSYARATAN

FIP yang memilih untuk melakukan pemenuhan melampaui persyaratan-persyaratan minimum yang dipaparkan dalam Komponen 1 dan 2 bisa melakukannya dengan menyerahkan satu SRA atau bukti satu pengkajian alternatif. Mereka harus mengikuti pedoman berikut ini dalam hal pengkajian risiko dan rencana kerja sosial terkait. Pedoman bisa berbeda-beda, yang ditentukan oleh jenis pengkajian.

1. **Untuk FIP yang telah menyelesaian satu SRA:**
    a. FIP harus menggunakan Templat Pengkajian Risiko FisheryProgress atau Templat Alat Pengkajian SRA.[38]
    b. FIP yang tidak diwajibkan untuk memenuhi Persyaratan 2.1 bisa memilih indikator-indikator yang mana dalam SRA yang hendak mereka kaji.
    c. SRA harus dilaksanakan oleh seorang konsultan HRSR yang berkualifikasi yang telah disetujui sebelumnya.[39]
    d. Pengkajian harus mencakup konsultasi dengan para nelayan dan para wakil nelayan, misalnya serikat buruh nelayan atau organisasi nelayan, LSM yang bergerak dalam bidang hak-hak buruh, atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang mewakili nelayan.
    e. Jika FIP menyerahkan hasil SRA, FIP tersebut juga bisa dengan sukarela memenuhi Persyaratan 2.2.[40]
2. **Untuk FIP yang menyerahkan bukti pelaksanaan satu pengkajian alternatif:**
    a. FIP harus melengkapi Formulir Ringkasan Pengkajian Alternatif.
    b. FIP bisa memilih bidang-bidang fokus untuk pengkajian alternatif mereka.
    c. Jika FIP dengan sukarela menyerahkan hasil satu pengkajian alternatif, FIP tersebut juga bisa dengan sukarela memenuhi Persyaratan 2.2.

[38] Silahkan melihat semua templat pelaporan di bagian templat di dashboard pengguna.
[39] Sebelum melaksanakan satu SRA, FIP harus menghubungi FishChoice untuk menegaskan bahwa konsultan yang terpilih memenuhi kualifikasi FisheryProgress. Ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya bisa mengakibatkan adanya biaya tambahan yang harus ditanggung FIP karena perlunya untuk dilakukan pengkajian ulang oleh satu pengkaji yang berkualifikasi.
[40] FIP yang dengan sukarela menyelesaikan satu SRA tidak diwajibkan untuk menyerahkan satu rencana kerja terkait, bahkan jika SRA mereka menunjukkan adanya wilayah-wilayah risiko tinggi. Meskipun demikian, FishChoice sanga tmendorong FIP untuk mempertimbangkan temuan-temuan dalam SRA, menetapkan bagaimana dan kapan akan memprioritaskan wilayah-wilayah risiko, dan menyusun serta menyerahkan rencana-rencana kerja untuk mengatasi sebagian atau semua risiko yang telah mereka identifikasi.

Penerapan dan Cakupan

Semua FIP aktif di FisheryProgress yang memberikan laporan dengan sukarela harus memenuhi persyaratan ini.

Pelaporan Kemajuan

FIP yang dengan sukarela menyerahkan satu pengkajian (SRA atau pengkajian alternatif) bisa membuat kajian ulang dengan frekuensi yang mereka tentukan sendiri, namun FishChoice mendorong dilakukannya pengkajian ulang paling tidak satu kali dalam tiga tahun. FIP yang menyerahkan satu rencana kerja sosial harus mengikuti jadwal pelaporan kemajuan di Persyaratan 2.2, bahkan jika rencana kerja tersebut bersifat sukarela.

3.1.2 DASAR PEMIKIRAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Menetapkan pedoman dasar untuk FIP yang memilih melakukan pemenuhan melebihi persyaratan-persyaratan minimum memastikan bahwa informasi pelaporan disajikan dengan menggunakan kerangka kerja yang sama sehingga membantu pemahaman pengguna FisheryProgress. Selain itu, pedoman mendorong semua FIP melakukan upaya untuk mengatasi potensi risiko tanpa memandang apakah mereka beroperasi dalam konteks risiko yang lebih tinggi atau tidak. Komponen 3 memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memberikan pelaporan tentang temuan-temuan risiko dengan sukarela. FishChoice mendorong FIP untuk menggunakan SRA untuk keperluan ini namun mereka juga bisa memilih untuk melaporkan temuan-temuan dari pengkajian alternatif.

LAMPIRAN A: INDIKATOR-INDIKATOR INTI SRA FISHERYPROGRESS

Tabel 2 di bawah ini berisi daftar lengkap indikator-indikator risiko SRA.[41] **Indikator Kinerja yang disajikan dalam warna biru dan diberi tanda asterik (*) merupakan Indikator-Indikator Inti SRA FIshery Progress**. Indikator-indikator tersebut:

- Wajib dikaji (jika berlaku[42]) untuk FIP yang memenuhi satu atau lebih dari satu kriteria adanya peningkatan risiko kerja paksa dan perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5 dan 2.1).
- Harus dikaji oleh perorangan atau tim yang memenuhi Persyaratan FisheryProgress untuk Konsultan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial, tanpa melihat apakah FIP diwajibkan untuk mengkajinya atau melakukannya dengan sukarela (lihat Persyaratan 2.1 dan 3.1).

Tabel 2: Indikator Risiko SRA

Komponen	Indikator Risiko	
Prinsip 1: Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya		
1.1 Hak asasi manusia dan hak buruh	**1.1.1***	Kekerasan dan pelecehan
	1.1.2*	Kerja paksa
	1.1.3*	Perdagangan manusia dan perekrutan yang adil

[41] Tabel di bawah ini mencerminkan versi 2.0 dari SRA.
[42] SRA dirancang untuk mencakup berbagai jenis perikanan dan konteks serta menyediakan seperangkat Indikator Risiko yang menyeluruh untuk tujuan tersebut. Artinya, tidak semua Indikator Risiko berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang bagaimana menentukan Indikator Risiko mana yang berlaku, silahkan mengacu ke tabel Panduan Penentuan Skor di Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Seafood.

1.1 Hak asasi manusia dan hak buruh	**1.1.4***	Kerja ijon di perikanan skala kecil atau budidaya perikanan
	1.1.5*	Pekerja anak
	1.1.6*	Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama
	1.1.7*	Penghasilan dan tunjangan
	1.1.8*	Istirahat yang cukup
	1.1.9a*	Akses ke layanan sadar untuk tempat tinggal pekerja/tempat tinggal di atas kapal
	1.1.9b	Akses ke layanan dasar untuk komunitas penangkapan ikan skala kecil atau perikanan rakyat
	1.1.10*	Keselamatan kerja
	1.1.11*	Penanganan Medis
	1.1.12*	Hak pengamat
1.2 Hak akses	**1.2.1***	Hak adat
	1.2.2	Tanggung jawab dan transparansi perusahaan
Prinsip 2: Memastikan kesetaraan dan peluang yang adil untuk memperoleh manfaat		
2.1 Kesetaraan	**2.1.1***	Tanggung jawab dan transparansi perusahaan

Prinsip 2: Memastikan kesetaraan dan peluang yang adil untuk memperoleh manfaat		
2.1 Kesetaraan	**2.1.2a**	Tata kelola perikanan dan sumber daya akuakultur yang inklusif
	2.1.2b	Tata kelola yang inklusif dalam angkatan kerja
2.2 Keadilan	**2.2.1**	Peluang yang adil untuk mendapatkan manfaat
	2.2.2*	Diskriminasi
Prinsip 3: Meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan		
3.1 Ketahanan Pangan dan Gizi	**3.1.1a**	Dampak pada ketahanan pangan dan gizi
	3.1.1b	Ketahanan pangan dan gizi untuk komunitas penangkapan ikan skala kecil dan budidaya perikanan
	3.1.2	Layanan kesehatan
	3.1.3	Pendidikan
3.2 Ketahanan Penghidupan	**3.2.1**	Manfaat bagi dan dalam masyarakat
	3.2.2	Fleksibilitas dan otonomi ekonomi
	3.2.3	Ketahanan penghidupan

LAMPIRAN B: SUMBER DAYA PENTING TERKAIT

Lihat sumber daya, templat, dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Kebijakan HRSR ini di FisheryProgress.[43] Secara khusus, pembaca bisa mengakses:

- Daftar Istilah FisheryProgress, yang berisi istilah-istilah dan definisi-definisi utama yang berkaitan dengan pemahaman tentang Kebijakan HRSR ini dan bahan-bahan terkait. Harap diingat bahwa istilah-isitilah yang diberi garis bawah dalam Kebijakan HRSR ini ada di dalam Daftar Istilah
- Templat-templat dan formulir-formulir yang dirujuk melalui tautan dalam Kebijakan HRSR ini
- Dokumen-dokumen pedoman untuk membantu pelaksanaan pemenuhan Kebijakan HRSR ini dengan bermakna
- Sumber daya-sumber daya tambahan dalam bidang tanggung jawab sosial yang untuk membantu FIP dalam mengupayakan untuk mengatasi risiko-risiko hak asasi manusia dan tantangan-tantangan tanggung jawab sosial lainnya dalam perikanan mereka
- Pedoman Tinjauan FIP, yang berisi rincian penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan HRSR ini dan pendekatan FisheryProgress dalam mengevaluasi informasi dan kemajuan sosial FIP
- Kualifikasi para konsultan HRSR dan satu basis data tentang konsultan FIP

FishChoice mendorong para pelaksana FIP untuk mengacu pada Komunitas Praktik FIP, dimana FishChoice menjadi salah satu peserta aktif, sebagai satu sumber utama untuk mendapatkan informasi untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan HRSR dengan efektif dan bermakna.

[43] Beberapa sumber daya tersedia di situs FisheryProgress yang bisa diakses umum sementara sumber daya lain tersedia untuk pelaksana FIP melalui dashboard pengguna.